

# **DISTRIBUSI POLITIK**

(Studi kasus : Implementasi Program Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Prodi Ilmu Politik



Oleh :

RIZKA AINUN IZZA

1706016069

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Rizka Ainun Izza

NIM : 1706016069

Jurusan : Ilmu Politik

**Judul : Distribusi Politik Studi Kasus : Implementasi Program Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Mei 2021

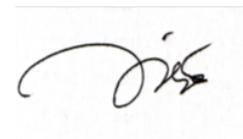
Pembimbing

Bidang Substansi Materi



Rofiq, M.Si

Bidang Metodologi& Tata Tulis



Masrohatun, M.Si

**SKRIPSI**

**DISTRIBUSI POLITIK**

**(Studi Kasus : Implementasi Program Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso  
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

Disusun oleh :

**RIZKA AINUN IZZA**

NIM : 1706016069

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan lulus.

**Susunan Dewan Penguji**



**Muhammad Elizabeth, M.Hum**  
NIP. 1971071999032001

**Sekretaris**

**Masrohatun, M.Si**  
NIP. 198806212018012001

**Penguji I**

**Muhammad Mahsun MA**

**Penguji II**

**Dr. Tolkhatul Khoir M.Ag**  
NIP. 195405031982031002

**Pembimbing I**

**Rofiq, M.Si**

**Pembimbing II**

**Masrohatun, M.Si**  
NIP. 198806212018012001

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Rizka Ainun Izza

1706016069

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada umat-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad saw yang telah menuntun umatnya dari zaman perbudakan menuju zaman tanpa penindasan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana S.Sos di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar dan setulus-tulusnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj Misbah Zulfah Elizabeth , M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak H. Adib, S.Ag, M.Si dan bapak Mahsun MA, selaku ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi pengarahan, dukungan, dan nasehat.
4. Ibu Masrohatun M.Si dan bapak Rofiq M.Si Selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Akhwan Fanani M.Ag selaku walisdosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat serta dukungan selama ini.
6. Bapak ibu Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.

7. Seluruh narasumber penelitian : Bapak Patrick Bagus Yudhistira selaku Lurah Purwoyoso, Ibu Yathy selaku bendahara program, bapak Supardi selaku koordinator BKM, ibu Diah selaku ketua kelompok PKK RT, bapak ketua RW, seluruh perangkat kelurahan purwoyoso dan juga warga purwoyoso yang telah berbaik hati meluangkan waktu, membantu dalam mencari data serta telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtua penulis ayah Jantho PS dan bunda Fitri Rachmani, serta seluruh keluarga penulis mbak Kyky, mbak Gita, mas Rezza, adik Wanda, dan Faqih Family yang tiada henti-hentinya mencurahkan doa, kasih sayang, kesabaran serta pengorbanan baik dari segi moril maupun materil kepada penulis dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Orang-orang terdekat penulis setelah keluarga, Enrico, Alifia, dan Anisa yang sudah selalu ada menemani penulis, memberi dukungan & saran, serta sabar menerima keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Nabila, Revnita, Nada, Citra, Cahya, Fiya, Mila, dan Emilia yang sudah selalu mendukung dan menghibur serta memberi masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis selalu semangat dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2017, Handita Timur, Siti Aminatun, Risma, Tahtia dan semuanya yang telah sama-sama berjuang di bangku kuliah dan selalu memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman organisasi, DEMA Fisip, PMII Rayon Fisip, terimakasih sudah berproses, belajar bersama, berbagi pengalaman.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Politik.

## **PERSEMBAHAN**

Kedua Orang Tuaku, ayah Jantho PS dan bunda Fitri Rachmani

Kakak adikku, Kyky Amalia, Rezza, Regita, Wanda

## **MOTTO**

“Setiap fase yang kamu jalani, harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya”. –Merry Riana

## ABSTRAK

Kehadiran politik, telah memberikan warna tertentu terhadap berbagai aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Dengan kata lain, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanpa kita sadari selalu berdampingan dengan politik. Berbagai definisi politik pun bersifat kompleks dan luas. Dalam hal ini, politik tersebut mengarah pada kebijakan yang dijalankan oleh instansi berupa program untuk masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi tolok ukur dalam menjalankan visi misi suatu instansi ataupun kelembagaan. Berbagai program yang dirumuskan oleh kepala instansi atau kelembagaan juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Kelurahan Purwoyoso merupakan salah satu kelurahan di Kota Semarang yang memiliki program untuk masyarakat yaitu program bantuan sembako sehingga dapat membantu masyarakat yang ada pada wilayah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

Program ini dapat berjalan dengan baik di kelurahan Purwoyoso, dengan komunikasi serta kerjasama yang terjalin antara ketua program dalam hal ini yaitu Lurah, dan anggota program dalam hal ini yaitu terdiri dari perwakilan pengurus PKK. Program ini diperuntukan khusus untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Dengan dana yang diperoleh dari jimpitan warga, maka program ini dapat dikatakan dari masyarakat dan untuk masyarakat, namun tidak semua masyarakat berhak mendapatkannya. Tentang siapa saja data penerima sembako inilah yang kemudian menimbulkan unsur politik didalamnya. Proses seleksi untuk siapa saja warga yang berhak menerima sembako, proses seleksi dilakukan tidak hanya oleh ketua program saja tetapi juga dibantu oleh pengurus program lainnya.

Teori George Edward III tentang implementasi kebijakan publik dan teori lainnya seperti teori Susan C Stokes (2013) tentang distribusi politik, membantu peneliti untuk menganalisa pembahasan mengenai penelitian dalam skripsi ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti mencari kebenaran data dengan mencari data secara langsung, dan melakukan wawancara untuk lebih memperkuat data yang diperoleh dalam penyusunan Skripsi tentang distribusi politik dalam implementasi program bantuan sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Kata Kunci : politik, implementasi program, kelurahan purwoyoso

## ABSTRACT

The presence of public policy has given a certain color to various aspects of life that we live daily. That is, in the life of society and the state, we are always side by side with what are called policies, policies in the social, cultural, and so on. Various issues to the influence or impact of policies are complex and broad. The policy is implemented with different results depending on how the leader's strategy and community support is as well as the situation, conditions in each region. In achieving its vision and mission, agencies or institutions are implemented through formulated programs.

The economic condition of the community is also a benchmark in carrying out the vision and mission of an agency or institution. Several innovations are carried out by the head of the agency or institution in accordance with the economic conditions in the region. Purwoyoso Village is one of the villages in Semarang City that has innovative activities so that it can help the people in the area to be able to meet their food needs.

This research was conducted to find out how the implementation of the basic food assistance program in Purwoyoso Village, Ngaliyan District, Semarang City. More specifically, to find out what are the factors that can support the implementation so that it can run effectively, how such a social program can be structured in a structured way with the system in its form. George Edward III's theory of four factors that can influence the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure was chosen by researchers as the basis for compiling the analysis in the discussion of this thesis.

This research shows that the implementation of the innovation program for basic food assistance activities in Purwoyoso Village, Ngaliyan District, Semarang City can run effectively supported by these four factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The implementation of this program has also succeeded in getting support from the Semarang city government, with a visit by Mayor Krisstiana SH.MM, to directly monitor the distribution of basic necessities in the Purwoyoso sub-district in May 2021.

**Keywords: public policy, program implementation, purwoyoso village**

## Daftar Isi

BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	3
C. TUJUAN .....	3
D. MANFAAT .....	4
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	13
BAB II .....	15
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Definisi dan Konsep Kebijakan Publik .....	15
B. Definisi Analisis Kebijakan Publik.....	20
C. Implementasi Kebijakan Publik .....	22
D. Makna Esensial dari “Inovasi” .....	30
BAB III.....	33
GAMBARAN UMUM KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG .....	33
A. Profil Kelurahan Purwoyoso .....	33
B. Gegografis Kelurahan Purwoyoso .....	34
C. Keadaan Demografis Kelurahan Purwoyoso .....	35
C. Bidang Pembangunan.....	36
BAB IV.....	39
PROGRAM BANTUAN SEMBAKO DI KELURAHAN PURWOYOSO.....	39
A. Kebijakan Program Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso .....	39
B. Program Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .	43
BAB V .....	48
IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN BANTUAN SEMBAKO DI KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG .....	48
A. Komunikasi ( <i>communication</i> ) .....	48
1 Dimensi Transmisi .....	49
2 Dimensi Kejelasan .....	49
3 Dimensi Konsistensi.....	51
B. Sumber Daya (Resources).....	51

1. Sumber Daya Manusia .....	51
2. Sumber Daya Anggaran .....	52
3. Sarana Fasilitas .....	55
4. Kewenangan .....	56
C. Sikap (Disposisi).....	57
D. Struktur Birokrasi .....	58
1. Teknis Pengelolaan program .....	59
2. Struktur Kepengurusan Program Bantuan Sembako di Purwoyoso.....	59
a. Ketua .....	61
b. Sekretaris .....	62
c. Bendahara.....	62
d. Anggota .....	62
BAB VI.....	65
KESIMPULAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso .....	35
Tabel 2 Sarana Pembangunan Kelurahan Purwoyoso .....	36
Tabel 3 Laporan Jimpitan PKK Kelurahan Purwoyoso 2021 .....	53
Tabel 4 Susunan Kepengurusan Program Bantuan Sembako Lansia Kurang Mampu Kelurahan Purwoyoso Tahun 2020 - 2022 .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kelurahan Purwoyoso .....	33
Gambar 2 Launching Program Bantuan Sembako Lansia Kurang Mampu 2019 .....	44
Gambar 3 Contoh Print Laporan Keuangan Jimpitan Kelurahan Purwoyoso.....	45
Gambar 4 Undangan Pembagian Sembako dari Kelurahan untuk Warga Penerima .....	50
Gambar 5 Pemberian Sembako Secara Langsung Oleh Lurah Kepada Warga.....	52
Gambar 6 Pengambilan Sembako yang di Wakilkan Ketua RW .....	52
Gambar 7 Kegiatan Pembagian Sembako, Mei 2021 .....	55
Gambar 8 Balai Kelurahan.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinamika aktivitas masyarakat sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari keberadaan atau kehadiran suatu kebijakan publik atau program pemerintah di tengah-tengah kehidupan kita dalam hal ini yaitu politik. Artinya, setiap hari kita bergulat dengan masalah-masalah kebijakan, mulai dari kebijakan yang berperspektif dari ruang lingkup internasional, ber-*scope* nasional, maupun yang diterapkan atau di implementasikan dalam wilayah regional atau lokal (Iskandar, 2017).

Program merupakan suatu bentuk kegiatan yang telah disusun dan di rencanakan untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan. Secara tertulis, pada peraturan pemerintah RI no. 21 tahun 2004 program diartikan sebagai penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Wilayah Indonesia memiliki pemerintah pusat sebagai aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan, dengan menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. (Surbakti, 2010, hal. 213).

Dalam penerapannya, tidak semua kebijakan atau program yang diterapkan itu berjalan sesuai dengan semestinya. Artinya ada yang berjalan dengan efektif adapula yang tidak berjalan dengan efektif hal ini disebabkan karena masing-masing wilayah atau daerah pada dasarnya memiliki kondisi geografis, demografis, potensi serta sarana dan prasarana hingga permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, peneliti sebagai mahasiswa yang berkuliah dibidang ilmu sosial dan ilmu politik, menjadi tertarik untuk membahas terkait program yang

diterapkan dilingkup masyarakat. Dengan melihat perkembangan kondisi masyarakat baik secara langsung seperti disekitar wilayah tempat tinggal peneliti khususnya di Kota Semarang, maupun secara tidak langsung seperti melalui sosial media atau berita, seperti kita tahu bahwa sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan situasi pandemi. Yang mana akibat dari pandemi, seluruh masyarakat harus menerima dampaknya di segala aspek kehidupan. Terutama masyarakat yang tergolong dalam berpenghasilan rendah. Menurunnya pendapatan yang secara signifikan akibat situasi pandemi akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pokok seperti pangan.

Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta menyusun konsep pemikiran yang telah disebutkan, peneliti menemukan fokus penelitian yang cocok yaitu program kelurahan berupa kegiatan bantuan sembako khususnya di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Bermula dari dasar pemikiran tersebut, menjadi lebih tertarik membahas mengenai unsur politik yang ada, yaitu tentang pendistribusiannya yang masuk dalam implementasi dari program bantuan sembako yang ada di kelurahan purwoyoso tersebut.

Berdasarkan data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti, dengan menuju ke lokasi pada tanggal 15 Desember 2020 dan berkomunikasi secara langsung oleh Lurah Purwoyoso, bahwa program bantuan sembako yang diterapkan di kelurahan Purwoyoso ini adalah salah satu program unggulan yang ada di Kelurahan Purwoyoso. Program ini berawal dari inisiasi bapak Lurah yang mana melihat permasalahan banyak nya warga purwoyoso kurang mampu khususnya lansia yang masih kurang mendapatkan sentuhan bantuan pangan. Sehingga Lurah Purwoyoso tergerak untuk membentuk program inovasi berupa kegiatan bantuan sembako untuk di salurkan kepada janda lansia kurang mampu yang ada di Kelurahan Purwoyoso yang harapannya program ini dapat terus berjalan dan bisa membantu janda kurang mampu terutama yang sudah lansia untuk meringankan kebutuhan mereka.

Dana yang diperoleh untuk terlaksananya program ini tidak berasal dari dana pemerintah pusat maupun daerah, melainkan dana yang didiperoleh dan dikelola yaitu berasal dari CSR dan jimpitan dari warga sekitar setiap bulannya. Dengan proses diskusi yang dilakukan oleh Lurah Purwoyoso dengan lembaga kemasyarakatan terkait yaitu seperti forum PKK dan ketua RT RW setempat, sampai pada titik mufakat, akhirnya program ini diterapkan. Program Inovasi Kelurahan yang dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan khususnya forum PKK yang dimotori oleh Lurah Purwoyoso ini sudah berjalan sebelum masa pandemi di tahun 2019 dan hingga sekarang di tahun 2021 masih tetap berjalan. Selama berjalannya

program ini, Lurah Purwoyoso tetap melakukan evaluasi untuk menentukan strategi atau perubahan sistem dalam program ini dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada.

Selain data primer, adapun data sekunder yang didapatkan oleh peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai info tentang program inovasi kegiatan bantuan sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bahwa dalam berita yang dimuat pada merdeka.com Semarang, pada 27 Juni 2019, Lurah Purwoyoso (Patrick Bagus Yudhistira) menerangkan program tersebut nantinya akan berjalan dengan setiap rumah di kelurahannya akan ditarik iuran Rp500 setiap bulan. Dana tersebut akan dikumpulkan dan akan dibelanjakan dalam bentuk sembako, kemudian sembako itu akan dibagikan kepada janda lansia kurang mampu setiap sebulan sekali. Lurah Purwoyoso juga memaparkan, dana yang dikumpulkan tersebut transparan. Karena akan ada laporan keuangan yang akan ditempelkan di kantor kelurahan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasinya. Untuk data penerimanya, pihak kelurahan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) dan masih akan di survei tim PKK jika ada yang belum masuk dalam daya kurang mampu.

Program yang awalnya sudah berjalan sebelum masa pandemi dengan tidak bergantung pada dana pemerintah baik dari pusat maupun daerah, dapat ter realisasikan di kelurahan Purwoyoso yaitu berupa kegiatan pembagian sembako yang diberikan kepada warga yang ada di kelurahan masyarakat, namun untuk pendistribusiannya tidak semua warga berhak mendapatkannya, proses penyeleksian data untuk siapa saja yang berhak menerima, dilakukan oleh panitia program, yang menjadikan hal menarik juga untuk peneliti membahas lebih lanjut tentang Distribusi Politik dalam studi kasus implementasi program bantuan sembako yang ada di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini, dilakukan untuk menjawab permasalahan utama dari latar belakang yang telah diuraikan. Adapun rincian rumusan permasalahan dijabarkan sebagai berikut :

- 1 Apa itu program kegiatan bantuan sembako yang berjalan di Kelurahan Purwoyoso?
- 2 Bagaimana implementasi Program Kelurahan dalam kegiatan bantuan sembako yang berjalan di Kelurahan Purwoyoso?

## **C. TUJUAN**

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari topik Analisis Implementasi Program Inovasi Kelurahan melalui kegiatan Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya akan penulis uraikan tujuan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut :

- 1 Mengetahui Program Kelurahan dalam kegiatan bantuan sembako yang berjalan di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- 2 Mengetahui bagaimana Implementasi Program Kelurahan dalam kegiatan bantuan sembako yang berjalan di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

#### **D. MANFAAT**

Manfaat dari Penulisan Skripsi ini secara khusus dapat dijabarkan menjadi manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara parktis. Adapun penjabarannya dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1 Manfaat Teoritik :
  - a. Penelitian ini dapat membangun keilmuan serta wawasan tentang keterkaitan antara sosiologi dan politik, melalui implementasi program bantuan sembako oleh Kelurahan Purwoyoso, dapat diketahui mengenai keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan.
  - b. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana sistem serta kegiatan bantuan sembako yang dijalankan oleh kelurahan purwoyoso dapat dikelola berdasarkan kerjasama antara masyarakat, lembaga, dan pemerintah kelurahan.
- 2 Manfaat Praktis :
  - a. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana seharusnya strategi serta kondisi kesesuaian dan prinsip-prinsip yang tepat dari pemerintah kelurahan bisa memicu keberhasilan serta keefektifan sebuah implementasi program yang dijalankan.
  - b. Penelitian ini dapat diajdikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti dan penulis lain yang ingin melakukan penelitian tema serupa yang lebih dalam dan komprehensif.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan Implementasi Program Bantuan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi serta menambah referensi.

Penelitian pertama, penulis menggunakan Skripsi dengan judul “Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Desa Kaliwenang Kecamatan TanggungHarjo Kabupaten Grobogan” yang ditulis oleh Duwi Reknani Mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi program penanganan fakir miskin melalui kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil di Desa Kaliwenang dan kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat desa Kaliwenang dan pemerintah daerah kabupaten dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Tanggungharjo sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat dan respon positif masyarakat pada program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil yang sudah dilaksanakan.

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program tersebut. Hal yang dikhawatirkan terjadi adalah kondisi dimana kebanyakan masyarakat berharap bantuan dari pemerintah tanpa adanya motivasi dari diri sendiri untuk mandiri dan mampu menindaklanjuti apa yang pemerintah telah berikan. Adapun dijabarkan mengenai faktor penghambatnya yaitu terletak pada masyarakat akan kurangnya informasi mengenai cara berternak dengan baik dan minimnya anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil didesa tersebut.

Penelitian kedua, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Soisal dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni’ matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilman Huda, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020. Penelitian ini fokus pada bagaimana pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana efektivitas pelaksanaan dari pelaksanaan bantuan sosial tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data. Oleh karena itu, perlunya suatu inisatif tersendiri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya.

Maka perlu suatu adanya keefektifan pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. (Fatkhul Khoiriyah, 2020, hal. 108)

Penelitian Ketiga, dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo” yang ditulis oleh Eko Yudianto Yunus Universitas Panca Marga Probolinggo tahun 2019. Fokus pembahasan dari jurnal penelitian ini adalah implementasi kebijakan bantuan BPNT ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini adalah Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong & RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Sumber daya manusia yang menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong & RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yaitu Koordinator Teknis, Pendamping BPNT serta masyarakat setempat. Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementerian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/ bulan. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya.

Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat banyak warga penerima yang memiliki pendidikan rendah dan buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong & RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi warga Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo juga tidak mengalami masalah. Disposisi implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong & RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing- masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang. Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC (Electronic Data Capture) menjadi keluhan masyarakat. (Yunus, 2019, hal. 50)

Penelitian keempat, dengan judul “Efektivitas Implementasi Program Kelurahan di Kota Pontianak” yang ditulis oleh Sri Maryuni mahasiswi Universitas Tanjung Pura tahun 2017. Penelitian ini fokus pada bagaimana efektivitas implementasi program kelurahan di Kota Pontianak. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pontianak yang telah menjadi target group dalam program ini, yaitu sekelompok masyarakat yang terorganisir dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) maupun kepala keluarga sebagai sasaran individu. Sumber data yang lain adalah implementator program yang berasal dari pihak pemerintah yaitu aparat kelurahan, aparat kecamatan, dan SKPD Pembina di Kota Pontianak. Didalam jurnal penelitian tersebut, dijelaskan bahwa Program Inovasi Kelurahan (PIK) adalah bagian dari usaha Pemerintah Kota Pontianak untuk membangun kapasitas dan memberdayakan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi, koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagai partner kerjanya. Implementasi Program Inovasi Kelurahan di kota Pontianak merupakan bagian dari usaha pemerintah kota Pontianak untuk membangun kapasitas dan memberdayakan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Program ini berusaha untuk mendorong terciptanya keunikan dari masing-masing kelurahan yang berbasis potensi yang dimilikinya dan mengembangkan inovasi manajemen pemerintahan serta meningkatkan kapasitas kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan kelurahan yang berkelanjutan. (Maryuni, 2017, hal. 30)

Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dinilai sudah efektif, karena sebagian besar kegiatan telah memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya guna meningkatkan kapasitas dan memberdayakan kelurahan, implementor atau pelaksana Program Inovasi Kelurahan di masing masing kelurahan telah sesuai antara tema kegiatannya dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) selaku Pembina kegiatan tersebut. Sedangkan kelompok sasaran yang terlibat dalam implementasi PIK adalah : institusi kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan kelembagaan masyarakat di Kota Pontianak. Kegiatan-kegiatan yang ada di masingmasing kelurahan dalam Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dinilai sudah sesuai dengan lingkungannya, karena kegiatannya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan telah memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. (Maryuni, 2017, hal. 32)

Penelitian kelima, adalah penelitian yang ditulis oleh Herfina Tedjo Warsito mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga tahun 2016. Dengan judul

penelitian “Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya”. Penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi program E-Kios di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Kebaron dan faktor apa yang mempengaruhi implementasi program E-Kios di Kelurahan Kebaron sebagai inovasi pelayanan publik di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa Program E-Kios Surabaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat semakin mempermudah penggunaan layanan yang ada, terciptanya transparansi, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi para pengguna. program E-Kios ini adalah seperangkat kegiatan yang telah diorganisasikan dan memiliki standar, prosedur, anggaran, dan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program Ekios.

Hasil penelitian ini yaitu implementasi program E-Kios di kelurahan Kebraon masih kurang maksimal dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu menjadi perhatian serta ditangani oleh kelurahan Kebraon maupun SKPD terkait. Pelaksanaan program E-Kios dapat dikatakan kurang maksimal karena adanya faktor disposisi dan komunikasi yang masih kurang maksimal dilaksanakan oleh staf di kelurahan Kebraon. Faktor disposisi pada pelaksanaan program E-Kios di kelurahan Kebraon menjadi kurang maksimal karena sikap dan respon staf pelayanan kelurahan Kebraon masih kurang bagus dalam pelaksanaan program E-Kios. Sikap staf kelurahan Kebraon yang masih kurang responsif terhadap pelaksanaan program E-Kios maupun pada saat melayani masyarakat. Terbukti dari mesin E-Kios yang selalu mati pada saat jam aktif pelayanan dan terkadang petugas kelurahan hanya membantu warga mengurus pelayanan dengan E-Kios pada saat waktu mereka longgar saja. Tidak adanya pemberian insentif kepada pegawai kelurahan sehingga menyebabkan petugas kelurahan menjadi kurang termotivasi dan kurang bersemangat dalam melaksanakan program E-Kios. Kemudian alur pengambilan keputusan pada saat terjadi masalah teknis pada program E-Kios yaitu ditangani oleh Lurah Kebraon sendiri dengan menghubungi bagian teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. (Warsito, 2016, hal. 15-16)

*Literature review* jurnal-jurnal dan skripsi yang mengacu pada rancangan penelitian, akan mempermudah peneliti untuk lebih memspesifikasikan dan menambah pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka setiap penelitian yang sudah dilaksanakan pasti ada tinjauan pustaka untuk acuan nya. Dari berbagai kajian mengenai implementasi program dan di Kelurahan, secara umum fokus utamanya kepada bagaimana implementasi program tersebut

dapat berjalan, mulai dari pelaksanaannya, keefektivannya, hingga pada kendala dan bagaimana pengaruh atau responnya untuk masyarakat sekitar. Namun belum ada yang secara komprehensif membahas mengenai bentuk inovasi yang di hasilkan melalui implementasi program yang di bentuk khususnya di kelurahan tersebut. Perbedaan lokasi sekaligus objek pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya meskipun dengan metode atau tema yang sama.

## **F. METODE PENELITIAN**

### a) Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis **penelitian kualitatif**. Penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat. Praktik-praktik ini mentransformasi dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan catatan pribadi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka (Denzin & Lincoln, 2011 hal.3) dalam (Cresswell, 2014, hal. 58).

Dalam kaitan dengan judul yang diajukan oleh penulis, penulis mencoba untuk menganalisis sebuah implementasi program inovasi kelurahan melalui kegiatan bantuan sosial khususnya bantuan berupa sembako gratis di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dengan pengamatan secara menyeluruh di mana penulis sebagai peneliti menjadi instrumen utama untuk menggali informasi dari peristiwa yang diangkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan permasalahan yang diuraikan. Penelitian yang dilakukan dengan terjun pada lokasi penelitian secara langsung untuk melakukan penelitian terhadap objek yang dikaji.

Di dalam konteks penelitian yang akan ditulis, relevan apabila menggunakan **pendekatan studi kasus** untuk mendukung jenis penelitian kualitatif. Karena merujuk pada satu case atau satu kasus. Studi kasus pada umumnya, merupakan suatu penelitian intensif

mengenai seseorang (bisa merujuk langsung pada orang, tempat maupun peristiwa). Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan studikasus karena peneliti mengidentifikasi satu kasus yang spesifik, yaitu program inovasi kelurahan berupa kegiatan bantuan sembako yang ada di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dan juga yang paling penting peneliti menggunakan pendekatan studi kasus adalah peneliti memperlihatkan mendalam tentang fokus penelitian tersebut. Dengan cara terjun secara langsung ke tempat penelitian yaitu Kelurahan Purwoyoso, mengamati atau melihat, ikut serta dalam kegiatan pembagian bantuan sembako dan mengikuti selama kegiatan tersebut berlangsung. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan beragam bentuk data kualitatif, mulai dari wawancara, pengamatan, dokumen, hingga bahan audiovisual.

Dalam studi kasus peneliti berusaha untuk menggali informasi semua variabel yang penting dalam suatu subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan data mengenai subjek saat sekarang, pengalaman masalampau, lingkungannya dan bagaimana variabel-variabel ini saling berhubungan. (Dantes, 2012, hal. 51).

Pendekatan penelitian juga merujuk pada sudut pandang keilmuan yang digunakan, dengan menyesuaikan skripsi terkait implementasi program inovasi kelurahan melalui kegiatan bantuan sosial di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan, peneliti menggunakan pendekatan secara sosiologis dan politik yang menjadi dasar memahami gejala atau menjawab masalah yang akan diteliti, yaitu terkait bagaimana sistem pengelolaannya, kemudian dan dari segi masyarakatnya.

#### b) Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama diperoleh dari sumber data pertama sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak lain sekaligus menjadi dukungan dari data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari objek utama penelitian yakni Lurah Purwoyoso kemudian diperoleh juga dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yakni para staf kelurahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan tersebut seperti PKK dan lain-lain, serta dari pihak masyarakat sebagai konstituen. Data sekunder didapatkan dengan cara mengambil dari berbagai sumber artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber dari berbagai media baik media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan tema implementasi program.

### c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data data penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui :

1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara atau *interviewer* menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun secara ketat. Pada saat di lokasi penelitian, peneliti membawa alat bantu yaitu *handphone* untuk merekam wawancara peneliti dengan para informan dengan lembar *interview guide* yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. (Warsito, 2016, hal. 13). Dalam penelitian ini, peneliti nantinya menyusun beberapa draf pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber yang ingin dituju yaitu, Lurah Purwoyoso, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, staff pengurus kelurahan yang ikut andil dalam kegiatan bantuan sosial, dan beberapa masyarakat penerima dan non penerima bantuan sosial berupa sembako tersebut.
2. Observasi, adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Ada berbagai macam observasi yang bisa dilakukan yaitu observasi partisipatif, observasi tersamar atau terus terang, dan observasi tak berstruktur. (Sugiyono, 2008, hal. 227-228) peneliti melakukan observasi partisipatoris dimana peneliti terjun langsung ke lokasi dengan mengamati situasi pada saat kegiatan bantuan sosial berlangsung, di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, serta peneliti juga melakukan observasi berdasarkan lingkungan untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat disana.
3. Dokumen dan Literature, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Hasil penelitian dari observasi maupun wawancara akan lebih kredibel apabila didukung dengan bukti-bukti dokumentasi seperti autobiografi, tulisan-tulisan bersejarah, dan sejenisnya. (Sugiyono, 2008, hal. 240). Dokumen utama yang akan dicari dalam penelitian ini adalah berupa data-data masyarakat penerima bantuan sosial berupa sembako yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian yaitu Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,

data-data lainnya yang terkait akan menyusul dan menyesuaikan sesuai dengan hasil penelitian akhir skripsi ini seperti foto kegiatan, naskah, catatan harian surat-surat gambar-gambar dan lain-lain. Selain itu, data juga diperoleh dari beberapa Literature yang relevan dengan penelitian yaitu dari buku, jurnal artikel, dan lain sebagainya.

#### d) Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data memuat penjelasan tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari :

##### 1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian tersebut cenderung akan berkembang apabila peneliti turun ke lapangan. (Sugiyono, 2008, hal. 245). Pada pra penelitian, peneliti melakukan observasi secara partisipatoris, dengan mengecek lokasi penelitian yaitu Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dan mengamati kondisi sekitar kelurahan, peneliti melakukan komunikasi atau bisa disebut dengan wawancara langsung, dengan Lurah Purwoyoso untuk menemukan data-data terkait skripsi penelitian penulis. Analisis pra lapangan ini dilakukan peneliti selama 3x dalam jangka waktu yang berbeda-beda dengan mengunjungi lokasi untuk melihat kondisi dan wawancara secara langsung kepada Lurah Purwoyoso.

##### 2. Analisis data pada saat di Lapangan dengan model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman dalam (Warsito, 2016, hal. 14). Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. **Reduksi data** diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Huberman, 1992, hal. 16)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data pada saat menganalisis hasil wawancara nantinya dengan narasumber untuk lebih memfokuskan sesuai dengan pembahasan skripsi penulis. **Data Display, atau penyajian data** yaitu Penyajian data hanya sebagai informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Yang kemudian semua data informasi disusun untuk dapat dianalisis. (Huberman, 1992, hal. 17-18) Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah reduksi atau pemilahan data dilakukan, tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan penulis untuk melakukan analisis sesuai dengan data yang telah didapat.

Langkah analisa selanjutnya yaitu **penarikan kesimpulan atau verifikasi data**, langkah analisis ini adalah langkah analisis hasil penelitian pada akhirnya, langkah ini dilakukan dengan menyimpulkan analisa dari sumber-sumber data yang diperoleh dari data-data sebelumnya, dan dilakukan verifikasi yaitu peninjauan kembali supaya dapat lebih terarah menemukan kesimpulan dan hasil penelitian penulis.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang kemudian rumusan masalah. Selain itu juga dijabarkan mengenai tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan ini. Di dalam Bab I ini juga akan diuraikan metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan konsep serta bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi penulisan skripsi.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini, akan dijelaskan secara detail terkait teori yang telah dimasukan di dalam proposal sebelumnya. Teori tersebut yang nantinya akan membantu penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah skripsi penulis dengan tujuan lebih terfokus untuk analisisnya.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai Kelurahan Purwoyoso sebagai lokasi penelitian, yaitu berisi profile lengkap Kelurahan Purwoyoso yang terdiri dari data demografi dan monografi Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

#### **BAB IV**

Pada bagian ini, akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang kebijakan atau peraturan, sistem terkait program inovasi kelurahan purwoyoso dalam kegiatan bantuan sembako

#### **BAB V**

Pada bagian ini, akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu terkait Implementasi Program Inovasi Kelurahan melalui kegiatan bantuan sosial di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan simpulan dari serangkaian penulisan penelitian yang dilakukan sebagai sebuah jawaban akhir dari rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis. Selain simpulan dari penelitian dalam bab ini juga akan disajikan saran untuk penelitian serupa kedepannya.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PUBLIK DAN DISTRIBUSI POLITIK**

#### **A. Definisi dan Konsep Kebijakan Publik**

##### **1) Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah kegiatan pemahaman manusia tentang pemecahan masalah. Kebijakan dibuat untuk dapat membuat solusi akan problematika manusia atas berbagai permasalahan yang ada. Pemerintah merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pembuat kebijakan untuk rakyatnya, namun terkadang kebijakan tersebut dapat diterima dan terkadang juga bisa ditolak oleh masyarakat. (Abdal, 2015).

Kebijakan identik dengan adanya regulasi atau peraturan dan keputusan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan dirumuskan oleh para pembuat kebijakan khususnya dalam hal ini yaitu pemerintah, yang kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan berupa program atau kegiatan secara berbeda-beda di masing-masing wilayah atau daerahnya. Seperti halnya definisi kebijakan menurut Wilson (2006:154) yang disebutkan dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 13) bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. (Taufiqurakhman, 2014, hal. 13)

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, maka secara pasti kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota. (Taufiqurakhman, 2014, hal. 14).

Kebijakan publik atau lebih tepatnya keputusan-keputusan kebijakan publik yang sesungguhnya telah menjadi penyebab timbulnya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di lingkup masyarakat, yang memberikan warna tertentu terhadap berbagai aspek kehidupan baik aspek spsial, budaya dan lain sebagainya. Di balik keputusan-keputusan kebijakan publik tersebut, ada serentetan proses-proses administrasi atau birokrasi dan politik rumit yang menggerakkan seluruh institusi negara atau pemerintah untuk memungkinkan semua hal itu terjadi secara teratur di sepanjang waktu. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 04)

Para pakar kebijakan mengkategorikan sejumlah masalah penting yang dianggap sebagai masalah kolektif. Masalah-masalah kolektif ini karena alasan politis, teknis, administratif, dan finansial tidak mungkin bisa diatasi secara individual melainkan harus ditangani secara kolektif, yang berupa kebijakan publik. Penanggulangan atau pengurangan atas sejumlah masalah fenomenal yang terjadi di sekitar kita, semisal kerusakan hutan parah (deforestasi), kerusakan terumbu karang laut, korupsi, urbanisasi, kemiskinan, dan pengangguran memerlukan solusi dalam bentuk kebijakan publik.

Demikian pula masalah kolektif yang sejak lama kita ketahui telah berlangsung di berbagai belahan dunia, seperti naiknya suhu panas bumi (*global warming*), krisis air bersih, krisis pangan dunia, dan kemiskinan global. Itu semua, hanya mungkin bisa diatasi atau dicarikan solusinya secara efektif bila dilakukan secara kolektif dan dilakukan oleh banyak negara. Perwujudan dari tindakan-tindakan kolektif yang melibatkan banyak negara tersebut misalnya melalui apa yang populer disebut sebagai

kebijakan publik global (*global public policy*). (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 05-06).

Dari uraian yang disertai contoh-contoh diatas, sudah mulai jelas bahwa hadirnya kebijakan publik di tengah kehidupan kita lewat tindakan pembuatan keputusan kebijakan publik itu berdampak langsung pada kehidupan inividu, kelompok, dan masyarakat. Oleh sebab itu, diberbagai tindakan dalam proses tersebut akan banyak pula orang yang terlibat didalamnya. Meskipun demikian, dalam realita politik, terutama kalau kita menengok di dunia politik dan pemerintahan dengan dinamikanya sehari-hari, apa yang disebut dengan istilah/ terminologi “kebijakan” itu seringkali penggunaannya dalam komunikasi politik saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar yang dibuat oleh pemerintah. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 06)

Bagi kalangan yang “dekat” dengan proses-proses kebijakan atau mereka yang berada dalam pusaran kekuasaan yang dalam literature dikenal dengan sebutan komunitas kebijakan istilah yang terkesan tumpang tindih seperti itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah apapun. Sebab, mereka sedikit banyak menggunakan referensi, bahasa, pola sosialisasi yang sama, atau bisa disebut juga dengan mereka berada dalam lingkup atau lingkungan yang sama. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 06)

Komunitas kebijakan itu ialah orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam proses pendesainan, pembuatan, dan implementasi kebijakan, semisal *policy makers, policy think, policy advisor*, dan para sewajatnya. Namun, tidak demikian bagi kalangan awam atau publik yang dalam aktivitas kesehariannya berada diluar komunitas kebijakan atau di luar struktur pengambilan keputusan kebijakan dalam artian disini maksudnya adalah masyarakat pada umumnya. Bagi masyarakat pada umumnya yang posisi politiknya tidak berada dalam lingkup proses pengambilan keputusan kebijakan ini, istilah-istilah teknis tersebut mungkin akan terdengar asing bahkan membingungkan, karena menimbulkan masalah-masalah semantik (kebahasaan) yang berawal dari kesalahpahaman serta distorsi pemaknaan. Karena kita tahu bahwa setiap inividu memiliki pemahaman atau pengetahuan yang berbeda, sama seperti halnya antara orang-orang yang berkecimpung dalam komunitas kebijakan dengan masyarakat umum biasa yang tidak ada dalam lingkup atau komunitas tersebut

maka keduanya tentu memiliki pemahaman yang berbeda tentang kebijakan. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 07).

James Anderson, mengkonsepkan kebijakan publik adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Anderson, 1994:5) dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 8). Dua teoritis lain, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Charles O Jones, juga menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan Anderson saat mereka mengatakan bahwa kebijakan itu tak lain ialah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhi (Jones, 1997) dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 09)

Konsep tentang kebijakan publik juga dijelaskan dengan versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mana dijelaskan lebih luas dan cukup rinci, bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. (United Nation, 1975) dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 09).

Dari perbincangan tentang konsep-konsep kebijakan publik diatas, kini kita menyadari bahwa semua pembuatan kebijakan publik itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara atau strategi yang berbeda pada setiap bidangnya. Seperti yang ditegaskan oleh Gerston (2002) dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 16) bahwa semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara. Itulah sebabnya, kebijakan dalam bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, akan diberi makna sebagai “kebijakan publik” jika sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan, dirumuskan, atau dibuat oleh instansi-instansi, serta melibatkan langsung atau tak langsung pejabat-pejabat pemerintah. Dapat dipahami bahwa kebijakan publik pada dasarnya bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda

pemerintah. Dengan demikian, kebijakan apapun sebenarnya mencerminkan respons atau tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tak lagi bisa ditoleransi. Artinya disini adalah kebijakan tersebut bersifat normatif, yang mana berupa aturan secara tertulis yang sudah ada dasarnya. Namun memang kebijakanpun juga dapat bersifat positif maupun negatif, yang mana sering memunculkan pro dan kontra oleh masyarakat dalam realitanya.

## 2) Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang bisa jadi melibatkan *stakeholders* lain yang menyangkut tentang publik, dimana secara umum proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan dan diakhiri dengan evaluasi. (Abdal, 2015).

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. (Taufiqurakhman, 2014, hal. 13)

Chief J.O Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981) dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 15) telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Ilmuwan politik, Carl Friedrich, mendefinisikan kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Eystone (1971 : 18) kebijakan publik ialah hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Demikian pula definisi menurut Wilson (2006 : 154) kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa

yang yang telah terjadi (atau tidak terjadi) . (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 13)

Pakar Inggris, WI Jenkins (1978 : 15) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berhubungan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara atau strategi untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan dan kekuasaan dari para aktor tersebut). (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 15)

Pakar Prancis, Lemeieux (1995 : 7) , mendefinisikan kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung bisa sepanjang waktu). (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 15)

Banyaknya definisi-definisi yang muncul dari beberapa para ahli tentang kebijakan publik, peneliti akan membantu pemahaman pembaca dengan menyimpulkan dari beberapa definisi tersebut, jadi kebijakan publik itu pada intinya adalah adanya “peraturan” yang sudah ditetapkan dan disepakati, yang diterapkan dalam bentuk “aktivitas atau kegiatan” yang terstruktur dan terorganisir. Kebijakan publik memang memiliki cakupan yang luas, karena kebijakan publik hadir berdampingan dengan kehidupan sehari-hari kita baik itu dalam bermasyarakat maupun dalam ranah yang lebih luas yaitu negara. Seperti contoh sederhananya saja, kita sebagai warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya memang dijalani, adapun hak dan kewajiban itu tertulis pada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Itu contoh dari kebijakan yang bersifat terikat (perundang-undangan).

## **B. Definisi Analisis Kebijakan Publik**

Ericson (1970) dalam tulisannya, *“The Policy Analysis Role of the Contemporary”*, merumuskan analisis kebijakan publik sebagai penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 40)

Dror (1971) mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang di kehendaki berkenaan dengan isu yang kompleks. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 40-41)

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara, tetapi bersifat multi disipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang *Policy Sciences*. (Taufiqurakhman, 2014, hal. 12).

Dalam hal akademis pemikiran studi-studi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik, sudah lama dikenal dengan adanya berbagai pendekatan yang dikembangkan oleh pakar atau teoritis kebijakan publik. Pendekatan-pendekatan itu, masing-masing tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dimaksudkan untuk dapat memotret dan memahami fenomena kebijakan atau problema kebijakan tertentu.

Oleh karena itu, kalau kita membahas analisis kebijakan, sedikit banyak yang kita bicarakan itu sebenarnya adalah beragam cara yang dilakukan oleh pakar kebijakan, baik secara individual maupun kolektif, dalam aktivitas yang disebut sebagai analisis kebijakan tersebut. Setiap analisis kebijakan publik saat dihadapkan pada tantangan riil untuk menganalisis suatu fenomena kebijakan secara implisit atau eksplisit tentu akan menggunakan suatu strategi kebijakan tertentu yang dianggapnya paling sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 41-42)

Berbicara tentang analisis kebijakan, kita tahu bahwa kebijakan bersifat luas, artinya ada yang bersifat nasional, regional, maupun lokal. Kebijakan tentu berkaitan dengan konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena kebijakan hadir di setiap aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, hukum maupun budaya. Kebijakan tersebut diterapkan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan di masing-masing daerah ataupun wilayahnya yang mana contohnya dapat berupa program-program di setiap bidangnya ataupun kegiatan sesuai dengan kebutuhan atau inisiatif antara pemimpin di instansi dan masyarakat di wilayah atau daerah tersebut.

Dalam realita sehari-hari, mengingat kompleksnya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, ada juga masalah-masalah kebijakan, yang mana dari situ setiap daerah memiliki cara atau strategi masing-masing yang berbeda dalam penerapan kebijakan di setiap daerah atau wilayahnya yang mana sifat dari kebijakan tersebut yaitu memecahkan permasalahan yang ada dalam wilayah tersebut.

Dalam rangka menyusun penelitian mengenai kebijakan, analisis perlu dilakukan dimaksudkan untuk membantu memahami lebih spesifik lagi tentang kebijakan yang berjalan di wilayah atau daerah tersebut, seperti contoh penulis memilih topik penelitian program inovasi

kelurahan yaitu berupa bantuan sosial yang berjalan di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan. Peneliti menganalisis mengenai bagaimana awal mula adanya program tersebut, inisiatif berasal dari mana, kemudian berjalannya program tersebut seperti apa, bagaimana sistem distribusinya, birokrasinya, dan lain sebagainya.

### **C. Implementasi Kebijakan Publik**

#### **1) Kompleksitas Implementasi Kebijakan**

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif siklus kebijakan, implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan trimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan (instan). Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal menghadirkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi bukan hanya bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan ada proses yang lebih kompleks didalamnya. Studi implementasi mau tak mau, akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh (dampak) apa, kemudian berapa banyak dari suatu kebijakan (Grindle, 1980) dalam buku (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 126) .

Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udohi (1981 : 32), pernah mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 126) .

Sayangnya, dalam khazanah pengetahuan yang kini kita kenal dengan dengan sebutan studi atau analisis kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasawarsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya para ahli ilmu politik, menaruh perhatian yang besar terhadap masalah proses implementasi kebijakan atau menerimanya sebagai studi proses perumusan kebijakan. Pada umumnya, studi atau penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli beberapa waktu yang lalu, lebih cenderung untuk memperhatikan pada masalah keputusan daripada masalah kebijakan itu sendiri, sehingga perhatian para ahli lebih tertuju pada masalah *the moment of*

*choice*. Yang menjadi fokus mereka ialah saat-saat ditentukannya pemilihan alternatif atau saat-saat dimana seharusnya suatu keputusan diambil, atau suatu strategi kebijakan tertentu dibuat atau dirumuskan. Dengan perkataan lain, para ahli di masa itu terlalu asyik dengan persoalan-persoalan perumusan kebijakan dan agak membiarkan masalah-masalah praktis dan rinci mengenai implementasi kebijakan itu menjadi urusan para administrator sendiri untuk memikirkannya. (Gunn, 1978:1 dalam buku "Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik" (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 126)

Akibatnya, sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh para ahli Ilmu Politik terhadap persoalan-persoalan implementasi kebijakan tersebut. Masalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan ini, kemudian lebih menjadi perhatian dari berbagai kelompok ahli lain, semisal, ahli administrasi publik atau administrasi negara atau ahli-ahli manajemen publik. Tidak heran selama puluhan tahun dalam studi kebijakan publik, terdapat semacam mata rantai yang hilang antara perumusan kebijakan dengan tahap evaluasi akhir kebijakan publik (Hargrove, 1975) dalam buku "Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik" (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 127)

Baru kira-kira pada awal 1970-an atau tepatnya sejak diterbitkan karya monumental Presman dan Wildavsky yang berjudul *Implementation* pada 1973, mulailah timbul perhatian yang besar terhadap masalah implementasi kebijakan ini. Hal ini setidaknya dapat kita temui dari semakin banyaknya buku-buku dan artikel-artikel ilmiah hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli secara rinci membicarakan implementasi sebagai unsur pokok dalam setiap Studi Kebijakan Publik (Hoogwood and Gunn, 1986:96) .

Di Amerika Serikat, barangkali salah satu penyebab pokok timbulnya hasrat yang kian besar dari para ahli terhadap masalah implementasi kebijakan ini ialah ditemukannya bukti-bukti yang menungkapkan ketidakefektifan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Amerika Serikat di sekitar tahun 1960-an, dalam mengupayakan perubahan-perubahan yang fundamental dimasyarakatnya. Demikian pula, di Inggris pada awal 1970-an ditemukan bukti yang sama, pemerintah ternyata tidak berhasil mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk menimbulkan reformasi sosial. Dari kedua peristiwa tersebut, kemudian ditambah dengan peristiwa-peristiwa lain yang secara jelas menunjukkan ketidakefektifan pemerintah dalam

mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang, semisal reformasi pertanahan, kesempatan kerja penuh, pengendalian pencemaran lingkungan, serta restrukturisasi industri, telah semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan pemerintah didunia ini, baik dinegara maju maupun di negara berkembang, sebenarnya baru mampu membuat dan mengesahkan kebijakan. Tapi belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 128) .

Gejala ini yang oleh Andrew Dunsire (1978) dinamakan sebagai *implementation gap* , suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan, dimana dalam setiap proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Walter Williams (1971:1975) disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa, sehingga ada kepastian bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 128)

Dari beberapa penjelasan mengenai kompleksitas implementasi kebijakan tersebut, penulis dapat memahami bahwa memang adanya atau munculnya suatu kebijakan yang kemudian diimplementasikan itu tidak selalu dapat berhasil, melainkan sebenarnya juga ada risiko untuk gagal. Seperti yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) ia telah membagi pengertian tentang kegagalan kebijakan dalam dua kategori besar yaitu kebijakan tersebut gagal karena tidak terimplementasikan dan kebijakan tersebut diimplementasikan namun tidak berhasil.

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya, tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, atau bisa juga mereka tidak menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 129)

Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam, dan lain sebagainya maka kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya faktor penyebab dari kegagalan implementasi itu disebabkan karena dari awal memang sudah kurang baik dalam proses pembentukannya. Artinya kebijakan tersebut telah dirumuskan namun semisal tidak didukung oleh informasi dan data yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan yang sama sekali tidak realistis. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 130) .

Pada akhirnya, Implementasi sebagian besar kebijakan publik atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, yang masing-masing berusaha keras untuk memengaruhi perilaku birokrat garda depan atau pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran.

Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama yaitu, pembuat kebijakan (pusat). Dilihat dari sudut pandang ini, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga ditingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga atau pejabat-pejabat tingkat yang lebih rendah atau daerah, dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. Apabila ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut, dan jika perlu kebijakan tersebut dirumuskan kembali. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 131)

Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang pejabat-pejabat dilapangan, maka implementasi akan terfokuskan pada tindakan atau perilaku para pejabat atau instansi dilapangan dalam upaya menganggulangi gangguan yang terjadi diwilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain diluar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka.

Sudut pandang ketiga yaitu, aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target*

*group*). Misalnya adalah golongan miskin dan berpenghasilan rendah dalam sebuah program yang menyangkut kesejahteraan sosial. Seperti perbaikan pemukiman kumuh di daerah perkotaan yang padat penduduk. Jika kelompok sasaran diharapkan menjadi pihak yang menikmati hasil dari suatu program, maka pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan para pejabat di pusat, yaitu sampai sejauh manakah pelayanan jasa yang direncanakan itu benar-benar telah diberikan. Sekalipun demikian, kelompok sasaran itu kemungkinan akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayanan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah itu benar-benar mengubah pola hidupnya, dampak apa yang mereka rasakan dengan adanya program yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, termasuk pendapatan mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi pejabat-pejabat pusat. Sebab, itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik politik (*political feed back*) dan peka terhadap asumsi-asumsi keperilakuan yang mendasari penyusunan setiap program. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 132)

## 2) **Konsep Implementasi Kebijakan**

Perbincangan tentang kompleksitas implementasi kebijakan yang telah dibahas diatas, mengantarkan kita pada pemahaman selanjutnya yaitu tentang konsep implementasi kebijakan. Seperti yang kita tahu secara umum bahwa implementasi itu adalah “pelaksanaan” , “penerapan”. Namun, jika dibahas lebih spesifik, konsep implementasi ternyata juga tidak sederhana, karena selain muatan makna konsep itu memang bersifat multidimensional juga mengundang multiinterpretasi. Kalau orang melihat konsep implementasi itu dari sudut pandang teori sikikal, maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan demikian, teori sikikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundangan. Dalam realita, mengingat kompleksnya persoalan yang muncul, tentu saja pemahaman kita tentang makna implementasi kebijakan tidaklah sedemikian formal, linear, kaku dan normatif seperti itu. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 133)

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti ini taklain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada wadahnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara maksimal.

Lebih sederhananya, situasi implementasi mungkin dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kereta kencana berpenumpang yang ditarik oleh empat ekor kuda yang warna kulitnya beragam : hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Seorang sais kereta yang piawai tentu saja harus memahami karakter individual dan perilaku masing-masing kuda. Ia harus mampu menciptakan kerjasama sedemikian rupa dengan keempat ekor kuda tersebut.

Penyikapan kognitif ini dimaksudkan agar keserempakan tempo berlari kuda-kuda (yang berbeda karakter) itu tetap terkontrol, dan yang terpenting kereta tidak terguling. Artinya, dalam sebuah program yang akan dijalankan pada suatu instansi ataupun di lingkungan masyarakat, dapat diimplementasikan dengan maksimal tergantung pada bagaimana orang-orang yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat bekerja sama, dan didukung dengan profesionalitas lainnya yang dijalankan. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 134).

Namun, tentu saja, dalam realitanya lebih spesifiknya didalam situasi sosial-politik, dalam implementasi kebijakan bisa dikatakan tidak identik dengan ilustrasi tersebut. Dalam penimplementasian kebijakan, selain melibatkan banyak orang juga menyangkut hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks (mungkin ada komisi DPR/DPRD, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha / pebisnis) dengan beragam aturan spesifik, situasi yang serba ideal yang seperti pada perumpamaan diatas sulit dibayangkan atau ditemukan. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 135)

Katakanlah misalnya, disisi pemerintah aturan perundangannya sudah jelas, unit-unit organisasi berikut staff yang diberi tugas sudah tersedia, tentu masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Bahkan, sering kita temui pula tarik ulur

kepentingan antara para aktornya, lobi-lobi politik tertentu untuk mengakomodasikan kepentingan guna menyamakan persepsi masih dibutuhkan. Dengan kata lain, meski situasi dan kondisinya sudah cukup mendukung, kemungkinan proses implementasinya akan berliku dan tidak mudah. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 135).

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor studi implementasi ini, proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan langsung mulus. Pandangan yang sama terkait implementasi juga di nyatakan oleh Van Meter dan Van Hom (1975) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 135)

Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 136)

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu tidak hanya seputar perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial langsung atau tidak langsung yang dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. (Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2015, hal. 137)

Implementasi Kebijakan, akan berproses atau berfungsi secara ajeg atau berulang-ulang tergantung pada baagaimana instansi ataupun kelembagaan tersebut. Namun tetap ada dititik pusatnya yaitu berdasarkan aturan-aturan pemerintah. Didalam pengimplementasian program atau kebijakan, tentu ada sumber daya pendukung yang

diperlukan, termasuk didalamnya SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi atau struktur birokrasinya, kemudian yang terpenting yaitu dana untuk menerapkan kebijakan yang direncanakan. Setelah melewati proses atau mempertimbangkan hal hal tersebut, dilakukan monitoring untuk melihat keefektifan dari program tersebut berjalan, terkait sistem dan aturannya dan lain sebagainya. kemudian yang terakhir tentu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dikembangkan untuk mengikuti dinamika perubahan masyarakat.

Jadi, karakteristik individual dan organisasional (kolektif) yang esensial dari proses implementasi adalah adanya kinerja atau kerjasama yang tepat waktu, dibarengi dengan kompetensi yang tinggi dari sejumlah satuan tugas yang diperlukan untuk mendukung bagi terlaksananya tujuan peraturan perundangan atau ketentuan hukum tersebut. Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu output, atau sejauh mana derajat dukungan terhadap suatu program, misalnya seberapa besar pengeluaran yang sudah dianggarkan untuk sebuah program ataupun sebuah penyimpangan. Akhirnya, pada kesimpulan terakhir, hasil implementasi menyiratkan bahwa telah terjadi seperti perubahan terukur mengenai masalah luas yang merupakan tujuan program, hukum publik, dan keputusan hukum. Contoh spesifiknya, apakah kemiskinan telah berkurang, atau apakah warga lebih aman jika dibandingkan dengan masa prapengesahan kebijakan mengenai kesejahteraan sosial atau hukum pidana, tentu semua perlu dipertimbangkan sesuai dengan situasi, dan kondisi masyarakat dengan sumber daya yang mendukung.

### 3) **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Teori Implementasi Kebijakan Publik memang sudah banyak dibahas oleh banyak para ahli, namun peneliti dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik menurut George Edward III.

**Teori George Edwards III**, menjelaskan bahwa ada empat faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan atau program, yakni *Communication* (Komunikasi) yang artinya menurut Edward III dalam (Widodo 2010 : 97). Komunikasi berarti “proses penyampaian informasi komunikator dengan komunikan”, komunikasi diperlukan dalam hal ini yaitu antara pembuat kebijakan dengan pihak lain yang berkaitan sehingga tujuan dan sasaran tepat pada apa yang sudah direncanakan. *Resources* (Sumberdaya) sumber daya yaang meliputi SDM (Sumber Daya Manusia) kemudian Suimber Daya

Anggaran dan Sumber Daya Peralatan yang meliputi gedung tanah dan sarana yang memudahkan dalam pelayanan implementasi kebijakan, Sumber Daya Kewenangan dalam hal ini implementasi kebijakan harus ada pelaku utama kewenangan dalam hal pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan.

*Disposition* (sikap) yang artinya kemauan kecenderungan dan keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan implementasi kebijakan secara sungguh-sungguh agar dapat tercapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu *Bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi) dalam hal ini faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasinya dan lain sebagainya.

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik atau program. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik atau program.

#### **D. TEORI DISTRIBUSI POLITIK**

Susan C. Stokes (2013), yang tidak terjebak memaknai politik dalam sebuah narasi besar yang abstrak, di mana politik ia maknai sebagai proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada warga. Sehingga secara sederhana pula bisa dinilai, bahwa aktivitas warga yang melibatkan diri dengan proses alokasi dan distribusi sumber daya adalah bentuk partisipasi politik.

Penjelasan terkait apa itu alokasi, apa pula itu distribusi, Stokes (2013) memulai penjelasan awalnya tentang sumber daya, yang dimaknainya sebagai sesuatu yang dapat memperkuat dan memberi daya pada warga untuk mencapai kemuliaan hidup. Sumber daya intinya adalah anggaran yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Sumber daya bisa bertransformasi menjadi suatu kebijakan, program, informasi publik, bantuan sosial, bahkan peraturan perundangan yang mengatur warga sebagai sesuatu yang memberi daya bagi warga untuk mencapai kemuliaan hidup. Sementara alokasi adalah sesuatu yang terkait dengan penganggaran (*budgeting*) dan perundangan (*legislasi*).

Alokasi adalah proses di mana sumber daya dianggarkan, uang ditempatkan pada berbagai bidang, serta aturan perundangan dibahas sesuai kebutuhan warga. Sedangkan distribusi adalah proses perubahan anggaran menjadi bentuk-bentuk sumber daya seperti

kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan yang telah disahkan disampaikan kepada warga.

Proses alokasi sumber daya adalah ranah pembahasan antara legislatif dengan eksekutif, pengesahan dari proses penganggaran dan legislasi adalah domain dari legislatif. Sementara proses distribusi yang terwujud dalam transformasi anggaran dan perundangan menjadi sesuatu yang memberi daya serta dihantarkan pada warga dalam bentuk kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan adalah tugas dari eksekutif dan jajaran birokrasinya.

Lantas pertanyaan utamanya adalah, berasal dari manakah dasar rujukan bagi proses alokasi (Budgeting dan legislasi) hingga distribusi (transformasi menjadi kebijakan, program, dan peraturan) sumber daya dilakukan oleh legislatif dan eksekutif, Jika proses politik ini bertujuan menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah warga, sudahkan warga ditanya dan dilibatkan dalam tiap prosesnya, dua pertanyaan inilah merupakan titik penting untuk menjawab partisipasi politik warga. Wakil rakyat dalam hal ini tidak bisa mengatasnamakan rakyat, karena ada jurang pemisah antara kepentingan warga dengan kepentingan partai politik. Karena Jika warga dan kepentingannya absen dari kedua proses tersebut maka sesungguhnya hanya kepentingan elit politik yang hadir dan bentuk kegagalan dari partisipasi politik warga.

Di sinilah hadir konsep politik distributif sebagai suatu strategi melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Berdasarkan teori distributif politik ini, jika dihubungkan dengan penelitian skripsi tentang distribusi politik dalam implementasi program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso, Strategi ini bisa dilakukan oleh panitia pengurus program dalam hal ini yaitu para panitia program untuk tidak terjebak oleh kepentingan oligarki. Politik distributif ini merupakan cara dalam mempertahankan kekuasaan dengan pelibatan warga. Karena warga diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dan perencanaan distribusi dari sumber daya.

Dari mana memulai proses politik distributif ini, Politik distributif adalah sebuah strategi yang memiliki kemampuan mendorong keterlibatan warga dengan menghubungkan antara fase perencanaan, fase kesepakatan, dan yang terakhir yaitu fase realisasi program bantuan sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan kota Semarang.

**Pertama**, fase perencanaan, fase Perencanaan ini sangat penting dalam politik distributif, karena merupakan bahan bakar bagi keterlibatan warga pada fase-fase

selanjutnya. Kesepakatan tentang proses perencanaan alokasi atau perencanaan anggaran, pada pos-pos mana anggaran itu di bantu oleh warga, sehingga harus disepakati pula bersama warga. Fase perencanaan ini, jika dikaitkan dengan teori implementasi program khususnya yaitu program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso, terjalin proses komunikasi antara pihak kelurahan dengan warga hingga menuju fase kesepakatan.

**Kedua**, fase kesepakatan. Fase ini adalah wujud sebuah kesepakatan politik untuk menggantungkan kepercayaan pada pemimpin, yang dipilih untuk mengemban amanat warga yang telah dirumuskan dalam fase perencanaan. Untuk memperjuangkan proses alokasi (penganggaran dan legislasi) yang telah dibahas dan disepakati melalui proses penyerapan aspirasi warga. Bentuk konkritnya dalam hal ini yaitu disposisi atau sikap warga yang mendukung program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota semarang.

**Ketiga**, fase realisasi program, ini merupakan proses setelah fase perencanaan dan fase kesepakatan. Bentuk konkritnya dalam hal ini yaitu dengan sudah adanya anggaran, sumber daya yang mendukung, maka perlunya kerjasama yaitu berupa komunikasi antara pihak kelurahan dengan warga agar proses alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan apa yang direncanakan, dan program berjalan sesuai dengan semestinya. Untuk lebih detailnya lagi, peneliti akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana implementasi program bantuan sembako yang ada di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota semarang yang berjalan, dengan kerjasama antara ketua panitia dan perangkat dibawahnya serta dukungan dari warga setempat. Beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya menjadi muncul seperti berapa kali pembagian sembako tersebut dalam perbulannya, apakah memang kegiatan rutin atau seperti apa, kemudian siapa saja yang mengelolanya, bagaimana birokrasinya, dan yang terakhir untuk siapa program itu, bagaimana bentuk darimana pendistribusian bantuan sembako tersebut.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

#### A. Profil Kelurahan Purwoyoso

Gambar 1 Kelurahan Purwoyoso



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021

Kelurahan Purwoyoso merupakan salah satu Kelurahan yang ada di wilayah kota Semarang yang dibentuk pada tahun 1993. Purwoyoso dahulunya adalah wilayah RW II Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu yang hanya terdiri dari 6 RT. Purwoyoso pada tahun 1992 dahulu namanya Kelurahan Krapyak. Kemudian ada pemekaran dan terpecah menjadi empat Kelurahan yaitu : Kelurahan Krapyak, Kelurahan Kembangarum, Kelurahan Purwoyoso, dan Semarang Barat. Setelah itu para orang tua dikumpulkan dengan BKM atau LPMK kemudian Kelurahan ini dinamakan Purwoyoso. Struktur pemerintahan Kelurahan Purwoyoso, yaitu mulai dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Kententraman Ketertiban, dan para staff.

Kelurahan Purwoyoso ini memiliki visi yaitu "Terwujudnya Masyarakat Petani Yang Mandiri Dengan Memiliki Kemampuan Cipta Rasa Karsa dan Karya Dengan Karakteristik Yang Beriman dan Bertakwa." Dikutip melalui web resmi Kelurahan Purwoyoso (<https://purwoyoso.semarangkota.go.id/visimisi>). Selain memiliki visi, tentu diikuti dengan adanya misi. Berikut misi dari Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang :

- Melaksanakan pelayanan umum secara maksimal
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

- Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan
- Melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi, Swadaya dan gotong royong masyarakat
- Melaksanakan usaha dalam rangka pembinaan, ketentraman, dan ketertiban
- Melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dari pemerintah Kota Semarang yang diberikan kepada Kelurahan dengan mengoptimalkan perangkat yang ada

Berdasarkan data monografi Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, kelurahan Purwoyoso ini memiliki luas tanah 1125 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 925 m<sup>2</sup> dengan kondisi bangunan yang masih baik dan terdapat satu balai kelurahan di sebelah kantor kelurahannya. Yang pada biasanya, balai tersebut juga digunakan untuk kegiatan Kelurahan Purwoyoso. Kelurahan Purwoyoso terbagi menjadi 92 RT dan 14 RW. Dengan kelembagaan kelurahan yang terdiri dari LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) kemudian organisasi kemasyarakatan lainnya (KIM,FIM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

### **B. Gegografis Kelurahan Purwoyoso**

Wilayah Kelurahan Purwoyoso sangat strategis, karena dilintasi jalur utama Pantai Utara (Pantura) yang menjadi urat Perekonomian Jawa. Fasilitas yang ada di Kelurahan Purwoyoso juga cukup lengkap, mulai dari tempat beribadah (masjid, mushola, gereja), pasar, toko swalayan, sekolah hingga perkantoran bahkan Kawasan Industri Candi yang merupakan Area bisnis yang terbilang cukup besar. Kelurahan Purwoyoso berbatasan langsung dengan Kelurahan Krapyak disisi Utara, Kelurahan Ngaliyan disisi Selatan, Kelurahan Kembangarum disisi Timur, dan Kelurahan Tambakaji disisi Barat. Kelurahan Purwoyoso terletak dilingkungan perkotaan sehingga mayoritas warga purwoyoso rata-rata berpotensi sebagai pegawai, buruh pabrik, karyawan swasta, hingga berwirausaha. (Farikhin, 2020).

Kondisi geografis Kelurahan Purwoyoso berada di ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 50 m, dimana wilayah ini banyak curah hujan mencapai 7.000 mm/tahun. Adapun kondisi topografinya berupa dataran rendah/tinggi dengan suhu udara rata – rata 26° C. Dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintahan, letak orbitasi dari Pemerintahan Kelurahan Purwoyoso cukup strategis. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 1 Km, jarak dari Ibukota Semarang 7 Km, jarak dari Ibukota Propinsi dari I sejauh 10 Km. Adanya kedekatan

antara pusat Pemerintahan Kelurahan dengan pusat - pusat pemerintahan lainnya akan memperlancar jalannya kegiatan Pemerintahan Kelurahan.

Kelurahan Purwoyoso memiliki suatu wilayah yang dikembangkan secara khusus yakni Kawasan Industri Candi yang dibangun pada tahun 1997 dan dikelola oleh pihak swasta. Adanya Kawasan Industri Candi ini berdampak cukup berarti bagi penduduk Purwoyoso, dampak positifnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran khususnya penduduk sekitar kawasan industri. Sedangkan dampak negatifnya adalah bertambahnya polusi udara, polusi suara akibat aktivitas pabrik, kerusakan jalan akibat padatny kendaraan berat yang sering melewati jalan serta bertambahnya migran yang bekerja di kawasan industri sehingga jumlah penduduk terus bertambah di Purwoyoso.

### C. Keadaan Demografis Kelurahan Purwoyoso

Dalam paparan tentang keadaan demografis Kelurahan Purwoyoso, akan disajikan gambaran tentang komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan mata pencaharian.

#### 1. Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin

Berdasarkan data monografi kelurahan Purwoyoso tahun 2021, memperlihatkan jumlah penduduk Kelurahan Purwoyoso sebanyak 17.173 jiwa yang terhimpun dalam 5.128 KK (Kepala Keluarga), dengan komposisi jenis kelamin penduduk adalah laki – laki sebanyak 8.771 jiwa dan perempuan sebanyak 8.402 jiwa. Sedangkan dari struktur umur dapat diketahui kelompok umur produktif (umur 20 tahun - 60 tahun) dan kelompok umur non produktif (umur diatas 61 tahun) yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1 Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persen (%)
1	0-5 tahun	1357	7,9
2	6-16 tahun	2.993	17,5
3	17-25 tahun	2.229	13
4	26-55 tahun	6.988	40,7
5	56 tahun ke atas	3.606	20,9
<b>Jumlah</b>		<b>17173</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2021.

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah penduduk Kelurahan Purwoyoso sebanyak 17.173 jiwa, kelompok usia 0-5 tahun berjumlah 1.357 jiwa dengan presentase 7,9%, selanjutnya

kelompok usia 6-16 tahun berjumlah 2.993 jiwa dengan presentase 17,5 %, kemudian kelompok usia 17-25 tahun berjumlah 2.229 jiwa dengan presentase 13%, kelompok usia 26-55 berjumlah 6.988 jiwa dengan presentase 40,7% dan terakhir yaitu kelompok usia 56 tahun keatas berjumlah 3.606 jiwa dengan presentase 20,9%.

## 2. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Berdasarkan data monografi kelurahan Purwoyoso di tahun 2021, jika dilihat dari sisi jumlah, sebagian besar mata pencaharian penduduk di kelurahan Purwoyoso sebagai buruh (buruh industri + buruh bangunan) dengan jumlah 3.566. Sedangkan yang lainnya adalah PNS, pensiunan ABRI/PNS, dan wiraswasta (pengusaha dan pedagang) . Adapun jumlah penduduk yang termasuk dalam pencari kerja laki-laki dengan jumlah 1.829 jiwa dan perempuan sejumlah 1.903 orang.

### C. Bidang Pembangunan

Deskripsi sektor fisik/ pembangunan di Kelurahan Purwoyoso dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 Sarana Pembangunan Kelurahan Purwoyoso

No	Bidang	Bentuk	Jenis	Jumlah
1	Agama	Sarana Peribadatan	Masjid	17
			Musholla	32
			Gereja	3
2	Pendidikan	Pendidikan Umum	TK	9
			SD (umum)	5
			SMP	1
3	Perumahan	Perumahan	Rumah Permanen	3.705
			Rumah Semi Permanen	998

Sumber : Data Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana peribadatan di Kelurahan Purwoyoso telah tersedia sarana ibadah baik untuk penduduk yang beragama Islam berupa Masjid dan Mushola, dan Gereja merupakan sarana ibadah bagi penduduk yang beragama Kristen. Sedang untuk sarana ibadah bagi penduduk yang beragama Hindu dan Budha mereka harus ketempat – tempat lain yang ada Puri atau Wiharanya, seperti di Tanah Putih, Watu Gong dan lain sebagainya. sedangkan untuk sarana pendidikan menunjukkan bahwa di Kelurahan Purwoyoso sudah tersedia tempat – tempat pendidikan baik umum (formal) yaitu dari pendidikan TK, SD, dan SMP. Untuk sarana perumahan, bahwa kondisi penduduk di Kelurahan Purwoyoso telah mampu membangun tempat tinggalnya secara layak, dan termasuk pula dilingkungan Kelurahan Purwoyoso adalah komplek perumahan BTN. Adanya sarana dari BTN ini semakin

menambah keramaian di wilayah Kelurahan Purwoyoso serta aktivitas sosial ekonomi semakin berkembang.

Selain sarana peribadatan, dan pendidikan berdasarkan data monografi yang terdapat dalam penelitian Dwi Prawani Rejeki di penulisan tesisnya 2006, Kelurahan Purwoyoso hingga saat ini terdapat sarana kesehatan berupa unit pelayanan Puskesmas ada 1 buah. Guna membantu meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) sudah ada 3 buah Pos/Klinik KB dan dibantu oleh 13 buah Posyandu. Dengan adanya sarana kesehatan tersebut, khusus untuk pelayanan pertama dan KB maka di Kelurahan Purwoyoso tidak mengalami kendala. Adapun sarana perkeonomian di Kelurahan Purwoyoso ada dua bidang yang cukup menonjol yaitu :

#### a. Bidang Perdagangan

Perdagangan di Kelurahan Purwoyoso cukup berkembang, hal ini terlihat dari beragamnya jenis barang yang dijual. Perkembangan jenis dan jumlah pedagang di Kelurahan Purwoyoso juga dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis, jumlah penduduk yang padat dan ramai, mudah dijangkau karena berada disisi jalan antar kota sehingga usaha perdagangan tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Berbagai jenis barang yang diperdagangkan antara lain barang kelontong, buah – buahan, bahan bangunan, rongsokan, mebel, kayu/kusen, BBM, makanan burung, sembilan bahan pokok, pedagang onderdil motor/mobil, alat – alat listrik , aneka usaha, warung makan dan blanja. Hasil usaha dagang ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kelurahan Purwoyoso saja melainkan juga penduduk di luar Kelurahan Purwoyoso. Usaha perdagangan ini merupakan sarana perekonomian yang akan mendukung bagi pembangunan perekonomian di Kelurahan Purwoyoso sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan warganya.

#### b. Bidang Jasa

Bidang usaha jasa adalah bidang yang banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk di Kelurahan Purwoyoso. Ketertarikan pada bidang jasa ini didasari pada modal yang relatif kecil dan tingkat pemasaran layanan jasanya mudah, karena jumlah penduduk yang padat sehingga merupakan pasar potensial ditambah lagi letak Kelurahan Purwoyoso yang berada di sisi jalan antar propinsi yang memungkinkan akses dan jangkauan layanan jasanya pun lebih luas. Jenis usaha jasa yang dijalani penduduk di Kelurahan Purwoyoso antara lain terdiri dari jasa transportasi seperti ojek, becak motor, angkutan umum, penjahit/konveksi, jasa

telekomunikasi, jasa salon, pertukangan, jasa hiburan, jasa reparasi/bengkel, jasa persewaan mobil, jasa percetakan/sablon, jasa persewaan alat – alat pesta, dan jasa rumah kos.

## **6. Sarana Perhubungan**

Sarana perhubungan jalan di Kelurahan Purwoyoso merupakan jalan antar kelurahan dan jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain, dan sarana perhubungan ini telah cukup maju karena sebagian besar jalan di Kelurahan Purwoyoso telah diaspal. Selain sarana jalan juga terdapat sarana komunikasi, adanya sarana telekomunikasi ini akan mempermudah hubungan komunikasi antar warga dengan warga lain baik untuk kegiatan sosial maupun ekonomi (bisnis).

## **BAB IV**

### **PROGRAM BANTUAN SEMBAKO DI KELURAHAN PURWOYOSO**

#### **A. Kebijakan Program Inovasi Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso**

Program Inovasi merupakan program yang dirumuskan dari inisiasi masing-masing instansi tersebut. Adanya program ataupun kegiatan yang ada di instansi tersebut, pada dasarnya dirumuskan tetap berdasarkan dengan payung hukum yang ada. Program bantuan sembako termasuk dalam program bantuan sosial yang mana dalam PerMensos No. 01 tahun 2013 pasal I disebutkan bahwa bantuan sosial merupakan upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bantuan sosial ini diberikan secara langsung dari kelurahan kepada sasaran (penerima) berupa sembako seperti beras, minyak goreng, gula, teh, dan mie instan setiap paketnya untuk kebutuhan dasar pangannya dalam beberapa waktu kedepan. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan sosial yang mana dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bahwa perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Kegiatan bantuan sembako di kelurahan Purwoyoso, berjalan dengan sistem dan ketentuan yang di putuskan oleh pihak kelurahan dalam hal ini yaitu Lurah, tim pengurus PKK, dan lembaga kemasyarakatan terkait sebagai penggerak dalam program bantuan sembako ini. Untuk sistem dari pendistribusiannya melihat situasi dan kondisi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, program ini launching pada tanggal 27 Juni 2019, dengan sistem pendistribusiannya yaitu penerima datang langsung ke Kelurahan Purwoyoso tepatnya di balai kelurahan dengan membawa undangan yang nantinya undangan tersebut diberikan kepada panitia dan ditukarkan dengan paket sembako yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelumnya panitia sudah merekap untuk jumlah kuota yang akan di berikan sembako pada bulan itu, menyertakan nama-nama penerimanya didalam undangan tersebut yang kemudian dibagikan ke masing-masing perwakilan pengurus RW untuk disampaikan kepadaarganya yang menerima agar mengambil

bantuan sembako tersebut berdasarkan waktu yang sudah tertera dalam undangan tersebut. Dalam penentuan sasaran atau kuota untuk penerima sembako, tim panitia dalam hal ini yaitu Tim PKK dibantu oleh BKM .

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 Indonesia didatangkan dengan munculnya permasalahan baru yaitu pandemi. Karena pandemi banyak warga yang penghasilannya turun secara signifikan, bahkan sampai ada yang dirumahkan pada saat itu. Akibatnya, mereka menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka karena penghasilan yang menurun. Dengan kondisi pandemi tersebut, tidak menjadikan program ini berhenti. Namun, berdasarkan hasil observasi, terdapat perbedaan-perbedaan pada sistemnya. Baik itu dari sistem sasarannya maupun sistem untuk pendistribusiannya.

Sebelum masa pandemi, sasaran dari program ini adalah diperuntukan khusus lansia janda / duda yang kurang mampu, tetapi setelah pandemi, sasarannya adalah juga warga yang terdampak covid, atau memang warga yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Tetapi untuk kuota tetap ditentukan oleh pihak kelurahan. Untuk sistem pendistribusiannya, sebelum pandemi penerima menerima langsung di kelurahan, namun karena pandemi dan PPKM diperketat, maka pendistribusian sembako dapat dibagikan secara simbolis oleh tim panitia program ke beberapa RW saja, sisanya perwakilan dari masing-masing RW untuk datang ke kelurahan, sebagai koordinator supaya bantuan tersebut di berikan kepada warga yang sudah terdaftar

Berbicara tentang kebijakan tentunya terkait dengan peraturan maupun sistem dalam pelaksanaan programnya. Awal dari adanya program ini belum terbentuk SK, karena masih melihat untuk tingkat keefektifannya. Ternyata setelah berjalan selama beberapa waktu dari 2019-2020, program ini cukup didukung oleh warga dan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program ini. Dengan tim penggerak PKK yang dimotori oleh Lurah Purwoyoso, akhirnya diputuskanlah pembentukan SK (Surat Keputusan Lurah) untuk program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Purwoyoso mengatakan bahwa ,

“terkait pembentukan SK, kami memang tidak secara langsung begitu program tersebut dibentuk, langsung kami SK kan, tidak, alasannya karena mengikat masyarakat dalam sebuah produk hukum bukanlah hal yang mudah. Disini kami harus menjaga juga namanya norma sosial dan norma masyarakat. Kami, Lurah itu kan berada dalam ranah kebijakan negara yang memang

bekerja atas dalam ranah negara. Tetapi Lurah juga harus mempertimbangkan aspek-aspek dari faktor hukum norma sosial, norma masyarakat, jadi akan kami tetap kami SK kan namun tidak secara detail, hanya lebih kepada peraturan terkaitnya dengan susunan panitia penggeraknya” (Wawancara : Patrick Bagus Yudhistira, 10 Juni 2021)

Program inovasi berupa kegiatan pembagian bantuan sembako ini merupakan kegiatan sosial yang bersifat positif dan dapat bermanfaat untuk warga yang membutuhkan. Program ini di organisir oleh lembaga daerah melalui tim penggerak PKK yang dibentuk oleh kepala Kelurahan. Sehingga, program ini didukung oleh pemerintah dengan adanya peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Walikota Semarang no.67 tahun 2020 tentang bansos bagi warga terdampak covid, Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, pemendagri no. 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP no. 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK yang tercantum sebagai acuan dari tersusunnya Surat Keputusan Lurah no. 465.1/ 163 / XII / 2020 Kelurahan Purwoyoso.

Didalam Surat Keputusan Lurah No. 465.1/ 163 / XII / 2020 menimbang bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Purwoyoso dipandang perlu ikut serta meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial, dan untuk itu dipandang perlu membentuk pengurus program bantuan sembako janda lansia Kelurahan Purwoyoso.

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dalam kaitannya dengan program ini, ada beberapa pemahaman istilah yang perlu diketahui bahwa dalam pasal I, disebutkan tentang kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Bantuan Sosial

adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, bantuan sosial termasuk salah satunya.

Pemendagri 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK. Dalam peraturan ini, di pasal 1 dijelaskan tentang TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi, lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk telaksananya program PKK. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain yang mengordinasikan kelompok dasawisma.

Peraturan Walikota Semarang no.67 tahun 2020 tentang Bantuan Sosial bagi warga terdampak covid, dalam peraturan ini di pasal 1 yang dimaksud dengan daerah adalah Kota Semarang, pemerintah daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dinas adalah dinas sosial kota Semarang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kota Semarang.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh lurah. Terdampak Covid-19 adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena imbas dari Covid-19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang terdampak Covid-19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri. Penduduk Kota Semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.

Dari peraturan-peraturan diatas, berkesinambungan dengan SK Lurah no. 465.1/163 / XII/ 2020 yang berisi terkait program inovasi kegiatan bantuan sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan mengingat dari adanya peraturan-peraturan tersebut, kelurahan purwoyoso mengemasnya berupa program yang diciptakan dengan model yang berbeda.

## **B. Program Inovasi Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

Program Inovasi Kelurahan, merupakan program yang berasal dari inisiasi kelurahan itu sendiri. Dirumuskannya suatu program tentu telah melewati proses diskusi, komunikasi antara Lurah dengan lembaga kemasyarakatan terkait. Tahun 2018, program ini muncul dari inisiasi bapak Lurah Purwoyoso, Patrick Bagus Yudhistira, yang mana sasaran utamanya adalah lansia kurang mampu. Alasan dari inisiasi bapak Lurah untuk mengadakan program ini yaitu masih melihat banyaknya warga khususnya lansia kurang mampu di kelurahan Purwoyoso, yang kurang mendapatkan sentuhan bantuan pangan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat dilihat dari data monografi kelurahan purwoyoso tahun 2021, bahwa dari sisi jumlah warga lansia di kelurahan purwoyoso, terbilang cukup tinggi yaitu 3.606 dengan presentase 20,9% maka, cocok apabila program bantuan sembako dari kelurahan ini dikhususkan untuk lansia yang kurang mampu dalam perekonomiannya.

Tujuan dari program ini pada intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya yaitu melalui bantuan sembako gratis yang diberikan dari pihak kelurahan kepada yang membutuhkan. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Lurah Purwoyoso, Patrick Bagus Yudhistira memilih forum PKK untuk menjadi tim panitia penggerak program bantuan sembako lansia di kelurahan purwoyoso. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dari salah satu informan bahwa pada tahun 2018 tepatnya bulan Desember, kepala kelurahan menginformasikan kepada ibu ketua PKK RW yang kemudian dari ibu ketua PKK RW tersebut di sampaikan kepada anggota, yang akhirnya di tahun 2019 tepatnya 27 Juni 2019, kepala kelurahan mengadakan pertemuan kepada forum PKK untuk mendiskusikan tentang adanya program bantuan sembako yang dikhususkan untuk lansia kurang mampu yang mana nantinya dana yang diperoleh yaitu dari dana jimpitan 500 rupiah perbulan per setiap kepala keluarga, dan menetapkan tim penggerak PKK menjadi panitia inti dalam

program bantuan sembako. Yang kemudian mencapai hasil mufakat. Tim panitia penggerak PKK setuju dan antusias bahwa program ini adalah dari warga dan untuk warga kembali.

Gambar 2 Launching Program Bantuan Sembako Lansia Kurang Mampu 2019



Sumber : Santuni lansia dari jimpitan.. ©2019 Merdeka.com

Dokumentasi yang terlampir diatas, merupakan acara launching program inovasi bantuan sembako untuk lansia di Kelurahan Purwoyoso. Yang dihadiri oleh tim panitia penggerak PKK berjumlah 13 orang, kemudian Lurah Purwoyoso dan segenap lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, berdasarkan data sekunder yang didapat oleh peneliti, acara ini juga di hadiri secara simbolis oleh 42 lansia janda kurang mampu. Yang mana dalam acara tersebut ketua penggerak PKK dalam acara ini menyampaikan bahwa semua rumah yang berada di Kelurahan Purwoyoso akan ditarik iuran Rp500 setiap bulan.

Dana tersebut akan dihimpun untuk dibelanjakan sembako yang kemudian dibagikan kepada lansia kurang mampu di kelurahan purwoyoso. Dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa dana yang dikumpulkan tersebut transparan karena akan ada laporan keuangan yang akan ditempelkan di kantor kelurahan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasinya. Tim penggerak PKK, Lurah Purwoyoso dan segenap lembaga kemasyarakatan terkait berharap dengan adanya himpunan dana ini bisa membantu para lansia kurang mampu untuk meringankan kebutuhan mereka. Untuk datanya, tim panitia program mengacu pada basis data terpadu dan masih akan di survei tim PKK jika ada yang belum masuk dalam daya kurang mampu.

Berdasarkan hasil data wawancara dengan kepala kelurahan purwoyoso, pada awalnya program ini belum mendapat dukungan dan kepercayaan penuh oleh warga sekitar kelurahan purwoyoso, namun dengan telah berjalannya program ini dan *feedback* baik yang diberikan dari panitia program kepada warga, maka warga menjadi mendukung penuh akan adanya program tersebut.

Gambar 3 Contoh Print Laporan Keuangan Jimpitan Kelurahan Purwoyoso

**LAPORAN JIMPITAN  
PKK KELURAHAN PURWOYOSO**

1 : NOVEMBER 2020

Tanggal	Uraian	Jumlah Penerimaan	Ket	No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pengeluaran
Nov-20	Saldo awal Bulan November 2020	Rp 12.869.000					
Nov-20	Terima dari Hamba Allah	Rp 5.000.000			11-Nov-20	Pembelian sembako	Rp 3.997.500
Nov-20	Terima dari RW 1	Rp 140.000					
Nov-20	Terima dari RW 2	Rp 192.000					
Nov-20	Terima dari RW 3	Rp 81.500					
-	Terima dari RW 4	Rp -					
Nov-20	Terima dari RW 5	Rp 100.000					
Nov-20	Terima dari RW 6	Rp 340.000					
Nov-20	Terima dari RW 7	Rp 150.000					
Nov-20	Terima dari RW 8	Rp 31.000					
-	Terima dari RW 9	Rp -					
-	Terima dari RW 10	Rp -	Lunas (sampai Bulan Desember 2020)				
Nov-20	Terima dari RW 11	Rp 108.500					
Nov-20	Terima dari RW 12	Rp 177.500					
Nov-20	Terima dari RW 13	Rp 205.000					
-	Terima dari RW 14	Rp -					
						Jumlah Pengeluaran	Rp 3.997.500
						Saldo Akhir	Rp 18.384.000
						Jumlah Keseluruhan	Rp 19.391.500
	Jumlah Keseluruhan	Rp 19.391.500					

ETUA TP PKK KEL PURWOYOSO  
Ny. Himmatul Aliyah, S.Pd

MENGETAHUI  
BENDAHARA PKK  
Ny. Yathy Maman

KEBUNING ROTA SEMBAKO  
KELURAHAN PURWOYOSO  
Purwokerto, 11 November 2020  
Patrik Bagus Yudhistira, S.IP

Sumber : Bendahara Pkk Kel Purwoyoso Kec. Ngaliyan

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dilampirkan untuk laporan keuangannya, mulai dari saldo awal, pemasukan, pengeluaran hingga saldo akhir yang diketahui oleh ketua TP PKK, bendahara PKK dan Lurah Purwoyoso. Selain untuk laporan bendahara kepada Lurah Purwoyoso, informasi mengenai dana ini juga dapat di share dari pengurus kepada warga sebagai donatur tetap untuk mengetahui bagaimana keuangannya. Berawal semua sasaran itu dikhususkan untuk janda lansia kurang mampu saja, kemudian karena kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia, tim penggerak program inovasi bantuan sembako yang ada di Kelurahan Purwoyoso tersebut memutuskan untuk sasarannya menjadi bertambah yaitu yang awalnya hanya terfokus pada janda lansia kurang mampu saja yang mendapatkan, kini bertambah sasaran menjadi warga yang terdampak efek dari kondisi pandemi. Lebih spesifiknya yaitu tetap pada standar (kurang mampu) seperti kepala keluarga yang sudah tidak bekerja, ataupun yang terkena PHK atau yang berpenghasilan cukup rendah pada intinya diberikan yang memang benar membutuhkan. Sumber dana (anggaran) dalam implementasi program ini tidak berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lurah purwoyoso selaku penggerak dan yang mengusulkan program itu mencari cara bagaimana program ini agar tetap bisa berjalan, dan tetap dapat membantu warga yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada Lurah Purowoyoso, yang mengatakan bahwa,

“program ini adalah program PKK yang menjadi inovasi saya selaku Lurah Purwoyoso, itu awalnya ide saya, karena melihat permasalahan banyaknya warga yang kurang mampu khususnya janda miskin lansia, yang kurang mendapatkan sentuhan pangan, maka dari itu program tersebut saya galakkan, awalnya tidak semua RW atau masyarakat ikut andil, karena kurang percaya tetapi alhamdulillah setelah satu tahun berjalannya program ini masyarakat kami guyub mendukung” (Wawancara : Patrick Bagus Yudhistira, 02 Juli 2021)

Istilah “jimpitan” yang sudah tidak asing lagi kita dengar terlebih lagi dalam lingkup masyarakat, jimpitan ini merupakan kearifan lokal dengan konsep gotong royong yang dapat menjadi solusi bersama dalam mengatasi masalah. Jimpitan sering dijumpai didesa ataupun kampung-kampung di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pada mulanya “jimpitan” dilakukan dengan cara mengumpulkan beras dari rumah ke rumah di lingkup kampung atau RT. Namun seiring perkembangan zaman, kegiatan mengumpulkan beras tersebut telah mengalami perubahan dengan cara mengumpulkan uang. Pada umumnya, jimpitan dikelola masing-masing RT yang kemudian digunakan untuk keperluan di RT tersebut. Uniknya, di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Semarang, jimpitan diadakan untuk tingkatan RW yang kemudian dikolektifkan kepada pengurus PKK untuk mendukung program sembako yang merupakan inisiasi dari Lurah Purwoyoso tersebut. Seperti yang di katakan oleh kepala kelurahan berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa,

“teknis atau inti dari kegiatan ini adalah dengan jimpitan 500 rupiah perbulan untuk membeli sembako dan dibagikan kepada masyarakat itu, uang rakyat yang dikelola oleh kelompok masyarakat khususnya dalam hal ini adalah PKK dan kemudian diberikan langsung oleh rakyat dan diawasi oleh rakyat, artinya disetiap bulan sekali dari panitia atau pengelola (PKK) itu mereka memberikan laporan keuangan yang juga terbuka, transparan dan diberikan kepada rakyat. Jadi laporan keuangan itu di print dan ditempelkan pada papan kelurahan. Jadi warga di kelurahan purwoyoso ini tau ada programnya. Pengawasan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh warga masyarakat juga. Jadi sistem ini memang sengaja kita buat untuk pemberdayaannya. Karena kalau kegiatan seperti ini dikit-dikit kita bergantung pada pemerintah, saya kira tidak tercapai implementasinya.” (Wawancara : Patrick Bagus Yudhistira 10 Juni 2021)

Kelurahan Purwoyoso mencoba membuat program yang menyentuh yaitu seperti program sosial terutama, menyentuh rakyat yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan, perkembangan dari program ini cukup baik karena mendapat dukungan yang tak hanya dari warga saja tetapi juga dari pihak lembaga

kemasyarakatan terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di kelurahan purwoyoso. Dan tim panitia program bantuan sembako kelurahan purwoyoso ini memodifikasi supaya bagaimana masyarakat bisa percaya dan kepercayaan ini tetap terjaga. Tidak adanya penyelewengan dan tidak adanya kecurangan. Dengan sistem transparansi yang diterapkan oleh kepala kelurahan, maka program ini dapat didukung oleh warga sekitar dan pihak donatur lainnya. Seperti yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara bahwa

“Tapi sekarang ini, kita modelnya pakai kupon. Jadi tidak semuanya bisa ambil, jadi yang mendapat kuota sembako yang diberikan kupon pada saat datang ke kelurahan ya ditukarkan. Tetap diambil disini, hanya memang, pemberiannya, jam-jamnya yang kita batasi. Langsung warganya yang menerima. Kita harus jamin itu supaya tidak terjadi pemotongan dalam alur pemberian bantuan ini. Jadi kita juga belajar dari beberapa persoalan soal bantuan sosial yang terjadi dimasalalu. Karna saya kira, ini kan amanah dari uang rakyat ya, ini kemudian menjadi sebuah bagian penting dalam artian good governance. Artinya, ya bagaimana ya bagaimana kemudian semua prosesnya ini bisa berjalan dengan bersih ya, dan diawasi oelh bersama. Selama ini dari instruksi Lurah secara lisan langsung saja. Menggunakan semua warga. Tetapi yang semua warga. Tetapi yang mengelola PKK diawalnya, berfikir bahwa ini kegiatan rakyat yang memang harus berjalan. Surat atau instruksi dari Lurah agar program ini bisa berjalan. Kepanitiaan juga sudah terbentuk.” ( Wawancara : Patrick Bagus Yudhistira, 10 Juni 2021)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cara yang diterapkan oleh kepala kelurahan purwoyoso dan lembaga kemasyarakatan terkait dalam implementasi program bantuan sembako di purwoyoso Semarang menerapkan salah satu point dari *Good Governance* yaitu transparansi, sehingga akhirnya mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat purwoyoso, dan pihak-pihak terkait lainnya di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang.

## BAB V

### IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI KEGIATAN BANTUAN SEMBAKO DI KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Untuk menganalisis implementasi program inovasi kegiatan bantuan sembako dikelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota semarang, peneliti menggunakan teori dari George Edward III yang menekankan pada empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, empat faktor tersebut yaitu, komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

#### A. Komunikasi (*communication*)

Faktor utama yang dapat mempengaruhi berhasilnya suatu program yaitu komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat, dan kebijakan ini seharusnya jelas, akurat dan konsisten. Jika para pembuat keputusan kebijakan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan tidak jelas dan bagaimana rinciannya, maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementatornya. (Tangkilisan, 2003, hal. 12)

Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementator dengan kewenangan ketika mereka mencoba untuk membalik kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan khusus. Kewenangan ini tidak akan perlu dilakukan untuk memajukan tujuan para pembuat keputusan aslinya. Dengan demikian, perintah-perintah implementasi yang tidak di transmisikan, tidak pasti, dan tidak konsisten, mendatangkan rintangan-rintangan serius bagi implementasi kebijakan atau dalam suatu program. Sebaliknya, ukuran-ukuran yang terlalu akurat mungkin akan merintangi implementasi dengan perubahan kreativitas dan daya adaptasinya.

Menurut Edward III dalam Widodo (1010:97) komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain :

## 1 Dimensi Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam program kegiatan bantuan sembako yang berjalan di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang, berdasarkan hasil observasi dimensi transmisi yang terjadi cukup efektif baik antara kepala kelurahan kepada tim penggerak PKK, maupun lembaga kemasyarakatan terkait, kemudian dari tim panitia kelurahan kepada sasaran warga yang dituju (penerima) atau warga yang menjadi donatur.

Informasi yang disampaikan pun bisa secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian informasi secara langsung disampaikan secara lisan dari kepala kelurahan kepada tim panitia penggerak PKK, melalui pertemuan rapat rutin kelurahan, ataupun melalui kegiatan pertemuan yang berlangsung di Kelurahan Purwoyoso. Selain komunikasi informasi secara langsung, kepala kelurahan juga melakukan komunikasi informasi secara tidak langsung yaitu melalui grup *Whatsapp* yang disusun oleh tim penggerak PKK, ataupun pesan personal *Whatsapp*. Kepala kelurahan Purwoyoso dan tim penggerak PKK saling bekerjasama untuk membuat komunikasi yang efisien untuk meminimalisir adanya miss komunikasi. Kepala Kelurahan juga turut berkomunikasi dengan csr-csr terkait dalam hal program ini, berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa,

“sebenarnya untuk dana jimpitan yang berjalan, masih bisa cukup tetapi terbatas, mengingat masih banyak juga warga yang harus kita bantu, untuk itu kita tidak bisa bergantung pada jimpitan saja, disini kita selain dana jimpitan juga dibantu dengan pihak swasta, terkadang mereka memberi sudah berupa sembako dan juga ada yang berupa uang, dari hasil dana jimpitan ditambah dengan CSR, maka jumlah dana akan lebih banyak dan secara otomatis akan lebih banyak warga yang dapat menerima bantuan sembako dari kita. Disini, alhamdulillah pihak kelurahan dapat dipercaya oleh csr csr yang mau bekerjasama dengan kita karena feedback yang mereka dapat adalah mereka tahu kalau dana nya memang benar untuk kegiatan bantuan sosial yaitu berbagi sembako untuk warga-warga purwoyoso yang membutuhkan” (Wawancara : Patrick Bagus Yudhistira, 10 Juni 2021”)

## 2 Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas

sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dalam program kegiatan bantuan sembako yang berjalan di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang, Dimensi Kejelasan berjalan efektif dengan adanya pengumuman yang bersifat komprehensif dalam setiap kegiatan yang ada. Pengumuman/ informasi adanya kegiatan bantuan sembako ini disampaikan dari Kepala kelurahan kepada tim penggerak PKK, kemudian dari tim penggerak PKK kepada masyarakat kelurahan Purwoyoso. Salah satu informasi yang disampaikan yaitu berupa undangan untuk masyarakat kelurahan Purwoyoso berupa pembagian sembako.

Gambar 4 Undangan Pembagian Sembako dari Kelurahan untuk Warga Penerima



Sumber : Panitia Pengelola Program Bantuan Sembako Kelurahan Purwoyoso

Dalam undangan tersebut dijelaskan secara detail penerima bantuan sembako, alamat dari penerima bantuan sembako, waktu pengambilan sembako, tempat pengambilan bantuan sembako. Undangan tersebut disampaikan secara langsung dari tim penggerak PKK kelurahan Purwoyoso kepada masing-masing koordinator RW yang kemudian sampai pada penerima bantuan sembako.

Sebelum penyusunan undangan, tim penggerak PKK sebagai panitia penyelenggara program kegiatan bantuan sembako yang berjalan di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang, melakukan rapat rutin sehingga tersampaikan maksud, tujuan, sasaran dari pembagian sembako yang ada di kelurahan Purwoyoso. Dalam rapat tersebut juga melakukan diskusi terkait kepada siapa bantuan sembako tersebut diberikan. Tim penggerak PKK sebagai panitia pembagian sembako memastikan bahwa sembako terbagi dengan adil dan sesuai dengan sasaran yang telah di sepakati.

### **3 Dimensi Konsistensi**

Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dimensi konsistensi yang ada pada program kegiatan bantuan sembako yang berjalan di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yaitu dengan adanya SK Lurah Nomor 465.1 / 163 / XII / 2020 SK tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program kegiatan bantuan sembako sehingga tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Selain hal tersebut adanya rapat dan pertemuan rutin yang diadakan sebulan sekali oleh tim penggerak PKK sebagai panitia pembagian sembako juga mendukung adanya dimensi konsistensi yang ada pada program bantuan sembako ini, sehingga tidak menimbulkan informasi yang simpang siur dan informasi dapat secara pasti diinformasikan dari tim penggerak PKK kepada masyarakat di masing masing RW yang ada di kelurahan Purwoyoso.

#### **B. Sumber Daya (Resources)**

Dalam teori George Edward III, dijelaskan bahwa tidak menjadi soal betapa jelas dan konsisten komando implementasi ini dan tidak menjadi soal betapa akuratnya komando ini ditransmisikan, jika personalia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula. Sumberdaya yang penting meliputi :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Implementasi Program inovasi kegiatan bantuan sembako dikelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang, sumber daya manusia yang dimaksud disini yaitu jumlah staff. Sumber daya staff yang dimiliki saat ini terbilang sudah cukup. Dengan Tim Penggerak PKK yang berjumlah 13, dan dibantu oleh perwakilan BKM, LPMK, dan beberapa relawan purwoyoso lainnya turut bekerja sama saling membantu dalam merealisasikan program ini.

Gambar 5 Pemberian Sembako Secara Langsung Oleh Lurah Kepada Warga



Sumber : Dokumentasi penulis, 2021

Gambar 6 Pengambilan Sembako yang di Wakilkan Ketua RW



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar diatas adalah proses pembagian sembako yang dibagikan secara langsung kepada warga dari pihak kelurahan. Berdasarkan hasil observas, pada bulan July 2021, karena saat itu Semarang sedang berlangsungnya PPKM yang ketat dan angka covid 19 di kota Semarang sedang meningkat, Lurah Purwoyoso beserta tim penggerak program mengatur strategi dan bekerja sama supaya progam ini tetap berjalan. Keputusan akhirnya adalah, sistem pendistribusian bantuan sembako dibagi menjadi 2 cara, untuk gambar VI pengambilan sembako di kelurahan purwoyoso dengan perwkailan per RW saja datang ke kelurahan, menandatangani serah terima, yang kemudian pihak kelurahan menginformasikan kepada RW untuk diserahkan kepada warganya yang bersangkutan. Dan untuk gambar V, ada yang diserahkan secara simblois yang dibagikan secara langsung oleh pihak kelurahan (tim panitia program) ke rumah warga penerima.

## 2. Sumber Daya Anggaran

Implementasi Program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso memiliki sumber anggaran tidak dari pemerintah pusat maupun daerah melainkan dari jimpitan warga purwoyoso dan dari donatur-donatur lainnya yaitu ada CSR, maupun perangkat kelurahan yang ada di kelurahan purwoyoso. Menurut teori George Edward III,

terbatasnya anggaran yang tersedia bisa menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal keterbatasan anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya anggaran untuk berjalannya suatu program itu sangat diperlukan. Untuk penjelasan mengenai sumber daya anggaran dalam program bantuan sembako yang ada dikelurahan purwoyoso kecamatan ngalihan kota Semarang, dalam tabel berikut :

Tabel 3 Laporan Jimpitan PKK Kelurahan Purwoyoso 2021

No	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Pembagian Sembako
1	Januari	13.861.500	-	13.861.500	
2	Februari	1.892.000	3.589.500	12.164.000	50 paket sembako
3	Maret	3.436.500	-	15.600.500	
4	April	1.114.000	3.453.000	13.261.500	48 paket sembako
5	Mei	-	-	13.261.500	
6	Juni	2.919.500	-	16.181.000	
7	Juli	-	4.309.500	11.871.500	60 paket sembako
8	Agustus	-	-	11.871.500	
9	September	-	4.480.000	7.391.500	62 paket sembako
10	Oktober	-	-	7.391.500	
11	November	2.594.000	-	<b>9.985.500</b>	

Sumber : Bendahara PKK Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa laporan keuangan jimpitan kelurahan purwoyoso pada tahun 2021, disini dapat disimpulkan bahwa pembagian sembako tidak terjadi setiap bulan namun terjadi pada bulan-bulan tertentu yaitu pada bulan Februari ada 50 paket sembako yang dibagikan, kemudian bulan April ada 48 paket sembako yang dibagikan, July 60 paket sembako yang dibagikan, dan September yaitu ada 62 paket sembako yang dibagikan. Sedangkan saldo akhir pada bulan November adalah sebesar 9.985.500. Saldo akhir tersebut akan di akumulasi dengan pemasukan yang ada pada bulan Desember 2021, dan akan dibelikat sejumlah paket sembako pula untuk dibagikan kepada Lansia dan warga yang membutuhkan di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Namun saat ini, untuk rekapitulasi bulan Desember belum dilakukan oleh Tim Penggerak Bantuan Sosial tersebut di Kelurahan Purwoyoso. Untuk itu, rekapitulasi yang terlampirkan hanya sampai bulan November.

Selain data yang terlampir pada tabel diatas, terdapat pula data pemasukan pada bulan **Mei 2021**, yaitu sejumlah **24.772.000** yang bersumber dari para donatur di kelurahan purwoyoso yang terdiri dari donatur beberapa RW seperti RW VIII, VII, XIII, III, II I, IV, XII, X, V. Dan CSR di purwoyoso (Kelompok Swadaya Masyarakat) seperti Tirta Bening, Tirta Segaran, Tirta Wening, Tirta Langgeng, Tirta Sari. seperti Bang Amat, Aneka Jaya, perangkat kelurahan lainnya. Dikarenakan pada bulan Mei tersebut bertepatan dengan hari besar yaitu hari Raya Idul Fitri sehingga banyak relawan, banyak donatur yang menyumbang ke kelurahan purwoyoso. Pada bulan Mei 2021 dibagikan sembako sejumlah 300 paket atas biaya dari para donatur-donatur yang tertera tersebut.

Berdasarkan data hasil observasi, hasil kolaborasi tersebut dari semua elemen kelembagaan dan para donatur, semua kelembagaan itu menjadi satu ditambah juga dengan pengurus yayasan anak yatim yang ikut menjadi donatur untuk program bantuan sembako ini. Jadi sistemnya, para donatur ada yang menyumbang dalam bentuk sembako dan ada pula yang menyumbang dalam bentuk uang, tim panitia pelaksana yang melakukan pembungkusan dan mengatur semua untuk berlangsungnya acara tersebut. Karena anggaran yang dihasilkan cukup banyak, kolaborasi pun juga banyak maka pembagian sembako pada waktu itu secara otomatis juga lebih banyak, bapak-bapak pengangkut sampah di kelurahan purwoyoso yang tercatat ada 23 mulai dari jalan Siliwangi, Prof Hamka, itu juga mendapatkan bantuan sembako pada bulan Mei 2021 ini. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Kota Semarang dengan hadirnya ibu Tia sebagai Ibu Walikota Semarang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Lurah Purwoyoso bahwa harga sembako yang biasanya melonjak mendekati lebaran menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Untuk itu lurah purwoyoso dan tim penggerak PKK mengatur dan mengelola dana yang dihasilkan dari jimpitan ditambah dengan dana dari CSR-CSR yang didapatkan. Acara penerimaan sembako pada waktu itu bulan Mei 2021, di hadiri oleh walikota semarang, yang berlokasi di balai kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang.

Gambar 7 Kegiatan Pembagian Sembako, Mei 2021



Sumber : postingan social media Instagram resmi akun milik : @tia\_hendi

Dalam postingan dokumentasi akun sosial media Instagram milik @tia\_hendi ibu Walikota Semarang, menghadiri acara pembagian sembako di balai Kelurahan Purwoyoso. Dalam postingan tersebut, diunggah di akun pribadinya dengan caption “*Alhamdulillah bertemu dengan warga kelurahan purwoyoso sekaligus pembagian sembako gratis untuk warga dari CSR dan PKK Kelurahan Purwoyoso*”. Dalam acara tersebut, sistem pembagian sembako untuk warga penerima adalah, datang ke balai kelurahan dengan kupon / undangan yang sudah dibagikan. Untuk yang lansia kalau tidak bisa menghadiri ke balai kelurahan, bisa diantar oleh tim program atau diwakilkan keluarganya. Isi paket sembako yang dibagikan saat moment lebaran tersebut selain ada sembako (beras, minyak, indomie, karena moment lebaran jadi ada tambahan roti kaleng dan susu). Respon dari masyarakat pun juga baik karena dampak atau pengaruh yang mereka rasakan dapat cukup bermanfaat untuk mereka.

### 3. Sarana Fasilitas

Selain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran, faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya implementasi program yaitu sarana fasilitas. Sarana fasilitas yang dimaksud disini adalah berupa bangunan dan peralatan. Bangunan yang digunakan untuk pelaksanaan program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso yaitu balai kelurahan. Balai kelurahan berada di sebelah kantor pelayanan kelurahan, yang mana posisinya berada diantara kantor pelayanan kelurahan dan kantor Sekretariat kelurahan Purwoyoso. Balai tersebut biasa digunakan untuk acara-acara maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan purwoyoso. Untuk alatnya, seperti mic, kemudian kursi, dan meja sudah disediakan di kelurahan purwoyoso yang biasanya ada di balai kelurahan tersebut.

Gambar 8 Balai Kelurahan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021

Dokumentasi tersebut merupakan situasi dan kondisi balai kelurahan yang sekaligus sudah terfasilitasi alat-alat untuk pelaksanaan kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, biasanya balai kelurahan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau acara rutin maupun acara-acara perkumpulan kelurahan dan sebagainya, termasuk dalam kegiatan pembagian sembako ini. Meski begitu, tidak setiap pembagian sembako di tempat tersebut, melainkan menyesuaikan dengan situasinya, kantor kesekretariatan juga dapat menjadi pilihan pengambilan tempat sembako. Tergantung pada jumlahnya, jika jumlahnya banyak maka menggunakan balai tersebut, namun jika sistemnya hanya perwakilan per RW saja, maka bisa menggunakan tempat di kantor kesekretariatan. Namun tempat atau sarana utama untuk fasilitas tempat tetap berada di balai kelurahan.

#### **4. Kewenangan**

Pada umumnya kewenangan dalam melaksanakan program bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program. Dalam hal ini, Lurah Purwoyoso sebagai ketua atau pemimpin yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan program ini. Lurah purwoyoso memiliki wewenang untuk memimpin jalannya kegiatan, dan menerima laporan dari para panitia pelaksanaan program, mulai dari laporan kegiatan, laporan keuangan dan lain sebagainya. Sedangkan tim panitia program memiliki kewenangan dalam berlangsungnya kegiatan tersebut, seperti menyiapkan acara, membagikan sembako, dan lain sebagainya. Penerima hanya menjalankan arahan dari para panitia yang sudah memiliki wewenang. Seluruh tim panitia penggerak program bantuan

sembako ini memiliki wewenang dalam pelaksanaan program ini, termasuk dalam penentuan untuk data penerimanya.

### **C. Sikap (Disposisi)**

Dalam teori George Edward III, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Para panitia program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang, bisa melakukan seleksi yang layak didalam implementasi program dalam hal mendata untuk penerima warganya. Cara dimana para panitia program ini melakukan seleksinya, yaitu mempertimbangkan mulai dari sarana yang tersedia, hingga tepat pada sasaran, dan dapat membawa manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan di kelurahan purwoyoso. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam penyeleksian data tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja, untuk itu tim penggerak PKK dibantu oleh BKM kelurahan dan sekaligus menerima informasi dari lembaga kemasyarakatan dibawahnya yaitu seperti pengurus RT dan RW.

Disposisi pada implementasi program kegiatan bantuan sembako di kelurahan purwoyoso, juga dapat dilihat dari sikap transparan yang diterapkan oleh Lurah Purwoyoso (Patrick Bagus Yudhistira) maupun pihak kelurahan terkait informasi dan kegiatannya, sehingga mendapat respon baik dan dukungan dari masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara salah satu warga yang terlibat dalam program itu, Nur Hidayah, mengatakan bahwa

“saya sangat setuju dengan program ini karena sangat bermanfaat dapat membantu perekonomian warga yang kurang mampu tetapi juga tidak memberatkan warga lainnya karena nominal yang diberikan untuk iuran terbilang cukup kecil. Menurut saya, program ini menarik karena dengan nominal iuran yang tidak memberatkan warga (sebagai donatur) tetapi manfaatnya cukup besar untuk penerima. Setau saya, jadi setiap kepala keluarga iuran 500rupiah perbulannya, biasanya ini dikumpulkan saat kegiatan PKK, kemudian diserahkan pada kelurahan, yang selanjutnya dikelola oleh panitia program untuk dibelikan sembako yang akan dibagikan pada masyarakat khususnya janda lansia yang kurang mampu dalam perekonomiannya”. ( Wawancara : Nur Hidayah, 12 Oktober 2021)

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan sikap para tim pelaksana yang mengatakan bahwa “Dalam menjalankan program ini, alhamdulillah Lurah Purwoyoso selalu mendukung dan warga juga mendukung” (Yathi, Noor Hayati, bendahara program). Dari situ, dapat dilihat bahwa sikap dari kedua pihak baik pelaksana program (pihak kelurahan) dengan masyarakat dapat saling mendukung dalam berjalannya program bantuan sembako yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang kurang mampu di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

#### **D. Struktur Birokrasi**

Dalam teori George Edward III, sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasional mungkin merintang koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintang perubahan, mengarah pada kebijakan bekerja dalam lintas tujuan, dan menghasilkan fungsi-fungsi yang terabaikan. Untuk itu perlunya struktur organisasi dalam implementasi program agar tertib dan tersusun sebagaimana tugasnya dalam melaksanakan program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso.

Pada umumnya, kebijakan publik itu di implementasikan oleh badan-badan administratif yang kita kenal dengan istilah birokrasi. Jika dalam pelaksanaan program, struktur birokrasi pun juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari jalannya sebuah program. adanya struktur birokrasi yang terbentuk akan lebih terarahkan untuk pelaksanaan programnya. Makna birokrasi menurut (Zauhar, 1996) dalam hal ini yaitu “birokrasi sebagai organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal”.

Organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang melibatkan banyak orang, dimana setiap orang mempunyai peran dan fungsi serta tugas yang saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi sebagai sistem kerja sama, ini artinya sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan secara baik, dimana masing-masing mengandung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap orang dapat bekerjasama secara efektif. Sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang berdasarkan kekhususan bidang kerja masing-masing. Dan yang ketiga sistem yang

terencana dari suatu bentuk kerjasama yang memberikan peran tertentu untuk dilaksanakannya kepada anggota. (Mustafa D. D., 2018). Dalam pembahasan struktur birokrasi dalam implementasi program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota semarang, peneliti akan membagi dua point yang pertama mengenai teknis pelaksanaan program dan yang kedua tentang struktur kepengurusannya.

## **1. Teknis Pengelolaan program**

Program bantuan sembako dari hasil dana jimpitan ini merupakan program PKK yang dimotori oleh Lurah, dan di inisiasikan oleh Lurah. Sasaran dari program ini, adalah warga yang kurang mampu dalam perekonomiannya di Kelurahan Purwoyoso, diutamakan janda lansia. Untuk data penerimanya, alurnya adalah nama-nama penerima diusulkan oleh setiap RT kemudian diajukan ke RW , yang nantinya RW akan mengajukannya kepada Kelurahan. Masing-masing RT dan RW tetap ada perwakilan kepengurusannya. Biasanya ketua RT dan RW yang sebagai koordinatornya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu RW yaitu ketua RW XI, mengatakan bahwa,

“program bantuan sembako ini menurut saya cukup bermanfaat untuk masyarakat, jadi program ini dikelola oleh kelurahan, sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, setiap beberapa bulan sekali atau pas ada moment-moment lebaran atau pas ada acara apa itu dibelikan sembako. Seperti disini biasanya khususnya janda yang tidak mampu, lansia yang tidak mampu, terus kadang-kadang yatim piatu tidak mampu juga bisa dapat. Untuk sistem pembagiannya, kami diinfokan dari kelurahan, jadi kelurahan memberi arahan, dan kita menyerahkan datanya, kalau untuk RW adalah koordinatornya. Jadi dari kelurahan juga mengkomunikasikan menyediakan berapa paket sembako kami menyesuaikan” (Wawancara : Ratno, 10 Desember 2021 )

## **2. Struktur Kepengurusan Program Bantuan Sembako di Purwoyoso**

Pelaksanaan fungsi birokrasi pemerintah sebagai pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan profesional, serta manajemen dan organisasi yang berorientasi pada pelaksanaan program, karena itu birokrasi sebagai “*public service*” harus mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab sehingga fungsi-fungsi yang dijalankannya dapat memperkokoh kedudukannya. (Mustafa D. D., 2018, hal. 30).

Dalam menjalankan fungsinya, birokrasi yang terstruktur dalam suatu wadah organisasi, melakukan proses atau kegiatan dan perilaku atau nilai, birokrasi harus

memiliki kemampuan profesional, kualifikasi atau administratif manajerial , dan hierarki yang jelas untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Jalannya suatu program dalam bidang apapun, juga dapat bergantung pada bagaimana birokrasinya. Bagaimana program itu dapat terorganisir untuk dapat melaksanakan program dan mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.” (Mustafa D. D., 2018, hal. 30).

Pengorganisasian dalam implementasi program bantuan sembako purwoyoso, ditetapkan oleh Lurah Purwoyoso yang sudah terlampir dalam SK Lurah Nomor 465.1 / 163 / XII / 2020. Kepengurusan tersebut terdiri dari Tim Penggerak PKK yang terbagi mulai dari pengurus inti yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, anggota terdiri dari masing-masing RW dan beberapa pokja. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus panitia program bantuan sembako purwoyoso, dikatakan bahwa,

“untuk sistemnya, setiap wilayah memiliki anggota PKK sendiri-sendiri, ada yang satu RT sampai 80 KK lebih, mungkin kalau banyak mereka menggunakan sistem Dawis cuman untuk di RT saya, dan RT lain, di RW 14 menggunakan sistem sama yaitu membayar iurannya ketika PKK RT, kemudian disetorkan kepada bendahara RW ketika PKK RW, kebetulan kalo untuk di wilayah saya terdampak tol, jadi tersisa sedikit warganya” (Wawancara : Diah Sani Susilawati, 12 Oktober 2021)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cara dari masing-masing koordinator PKK RT-RW berbeda. Tim panitia dalam hal ini yaitu PKK, mengetahui akan adanya program ini, program inovasi yang diciptakan oleh kelurahan yang mana menghimpun dari dana jimpitan sebesar 500rupiah persetiap rumahnya. Program ini sudah diplenokan sebelumnya dengan bapak pembina TP PKK Kelurahan Purwoyoso yaitu kepala kelurahan dan ibu-ibu RW sangat antusias dari warga untuk warga kembali. Proses disampaikan mengenai program ini kepada ibu ketua PKK RW yang kemudian disampaikan kepada bawahan, bahwa ada program jimpitan ini. Untuk rincian mengenai susunan kepengurusannya, penulis akan menjelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4 Susunan Kepengurusan Program Bantuan Sembako Lansia Kurang Mampu Kelurahan Purwoyoso Tahun 2020 - 2022

No	Nama	Kedudukan dalam Kepengurusan
1	Ny. Himmatul Aliyah Yudhistira	Ketua
2	Sri Utami	Sekretaris
3	Yathy Noorhayati	Bendahara
4	Sugiharti	Anggota
5	Tri Wulandari	Anggota
6	Dian Sani Susilawati	Anggota
7	Mahmudah	Anggota
8	Nunung Tri Sasanti	Anggota
9	Ikha Sub Handayani	Anggota
10	Eko Wahyuni	Anggota
11	Risnawati	Anggota
12	Tiena Maryuni	Anggota
13	Erna Hermiyati	Anggota

Sumber : SK Lurah Purwoyoso Nomor 465.1/163/XII/2020

Berdasarkan tabel diatas, bahwa ada 13 nama terlampir untuk tim penggerak PKK yang menjadi kepengurusan dalam program bantuan sembako di Kelurahan Purwoyoso. Ketigabelas orang tersebut, terdiri dari satu ketua, satu sekretaris, satu bendahara dan 10 anggota. Masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya untuk berperan dalam pelaksanaan program bantuan sembako ini. Berdasarkan hasil observasi, Dalam program bantuan sembako jimpitan yang ada di Kelurahan Purwoyoso, dalam mengorganisir program ini, terbentuk tugas-tugas dari masing-masing jabatan yaitu :

a. Ketua

Ketua dari program ini yaitu ibu Lurah. Ketua sebagai koordinator dan monitoring untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari program ini. Dalam pengimplementasiannya, ibu Lurah dibantu dengan bapak Lurah untuk mengkoordinir masing-masing bawahannya. Yang menyetujui dan memberi keputusan akhir dari tim tim panitia lainnya pula merupakan tugas dari ketua pantia tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, ibu Yathi mengatakan bahwa

“disetiap kita mau mengadakan program ini, atau seperti dalam hal membelanjakan sembako dan lansebagainya kita pasti lapor pada ibu ketua terlebih dahulu, dari situ kita diskusi dan komunikasikan sampai hasil akhir, kemudian melaksanakan” (Wawancara : Yathy, 11 Juni 2021)

b. Sekretaris

Sekretaris dalam program ini bertanggung jawab dalam hal arsip atau surat-surat, seperti misalnya membentuk undangan untuk RW, RT, dalam hal ini sekretaris dibantu oleh BKM kelurahan Purwoyoso. Sekretaris juga membantu BKM dalam menyeleksi data penerima bantuan di kelurahan Purwoyoso. Berdasarkan data hasil observasi, disebutkan bahwa program kerja TP PKK Purwoyoso tahun 2021 di bidang sekretaris, melakukan penetapan dan peningkatan fungsi kelembagaan, pemantapan kelembagaan dan kinerja kelompok PKK sampai dengan TP PKK. Kegiatannya mendata kelompok PKK dan mengadakan rapat-rapat seperti rapat konsultasi, rapat pleno, rapat koordinasi, penyusunan proker, dan mengadakan pelatihan manajemen dan sistem teknologi informasi. Kemudian dalam peningkatan komunikasi informasi dan edukasi tentang gerakan PKK membuat dokumentasi kegiatan PKK, membuat kliping 10 program pokok PKK. Yang terakhir yaitu supervisi, evaluasi, pelaporan dan monitoring.

c. Bendahara

Bendahara dalam program ini memiliki tanggung jawab terkait masalah keuangan. Berdasarkan data hasil observasi disebutkan bahwa program kerja TP PKK Purwoyoso tahun 2021 dibidang bendahara, yang pertama yaitu administrasi, dengan prioritas program yaitu tertib administrasi, menyusun anggaran kegiatan TP PKK, menyusun proker 2021, melaksanakan administrasi sesuai petunjuk 2021, membuat SPJ dan Laporan Keuangan, membuat album kwitansi masuk dan kwitansi keluar, kemudian dalam hal pembinaan administrasi keuangan, dan yang terakhir yaitu dana bantuan. bertanggung jawab terhadap keuangan, dalam hal ini tanggung jawabnya yaitu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dari dana program ini, seperti pengeluaran untuk pembelanjaan sembako, ataupun keperluan lainnya, kemudian untuk pemasukan seperti pemasukan dana jimpitan 500 rupiah per bulan. Catatan laporan keuangan akan dilaporkan pada lurah selaku penanggung jawab dalam program ini, dan laporan keuangan tersebut juga dikomunikasikan oleh bendahara kepada tim panitia yang lainnya.

d. Anggota

Anggota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan program bantuan sembako. Anggota-anggota ini yang menjadi koordinator per RW yang kemudian dikolektifkan pada bendahara PKK. Fungsi dari anggota ini juga ikut serta dalam

membantu penugasan tim yang lainnya. Seperti membungkus sembako, turut hadir dalam pembagiannya, menata ruangan jika memang pembagian tersebut di kelurahan, dan lain sebagainya. Anggota anggota didalam kepengurusan yang terlampir dalam tabel tersebut, terdiri dari masing-masing RW, dan terdiri dari beberapa pokja mulai dari pokja 1, 2, 3 dan 4.

Anggota sebagai koordinator dalam pengumpulan seperti dana, dan menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan kepada ketua maupun sekretaris dan bendahara TP PKK Kelurahan Purowyoso Ngaliyan Semarang. Masing-masing memang memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program ini yang sudah dijalankan sejak 2019, tetap saling membantu satu sama lain. Antara ketua, sekretaris dan bendahara saling berkoordinasi untuk merealisasikan dan menjalankan program bantuan sembako ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus program ini, ibu Yathy, mengatakan bahwa

“terkait dengan pembagian, pembungkusan, dan pembelanjaan sembako semua dilakukan dengan tim. Mengepak beras, membungkus the, gula, dan lain sebagainya menjadi satu, dilakukan secara bersama, baik itu anggota, maupun saya selaku bendahara program ini.”( Wawancara : Yathy Noorhayati, 11 Juni 2021).

Begitupun dengan alur pembagian atau pencarian dananya, tim penggerak PKK dibantu dengan BKM dan lembaga kemasyarakatan lainnya agar tetap berjalan untuk program ini dan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Secara sosiologis, perilaku birokrasi dalam konteks pelaksanaan program ini, para panitia kepengurusan dalam hal ini (PKK) Purwoyoso sudah berusaha dalam hal penataan masyarakat, pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada masyarakat dalam hal ini dapat dilihat seperti pada saat arisan PKK, atau perkumpulan-perkumpulan acara program perempuan lainnya. Sedangkan secara psikologis, perilaku birokrasi akan berkaitan dengan perilaku pribadi. Perilaku ini yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja dalam suatu program, berdasarkan hasil penelitian saat dilokasi, salah satu tim dari panitia program tersebut mengutarakan “kami dalam pelaksanaan dibantu dengan tim BKM, disini pokoknya kami tim PKK itu harus kreatif dan cekatan serta terus bekerjasama seperti ini supaya tetap jalan”

Dalam Surat Keputusan Lurah tentang Program Inovasi Kegiatan Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso ini, tidak dilampirkan untuk wewenang dan tugas secara detail untuk masing-masing kepengurusannya, karena memang tidak diharuskan

atau tidak diatur secara mengikat terkait hal itu. Untuk tugas dan wewenangnya tetap berjalan sesuai dengan jobdisk pada umumnya. Ketua sebagai koordinator, bendahara untuk keuangan, sekretaris persuratan dan lain sebagainya. Didalam SK Lurah tersebut, struktur kepengurusan terlampir sejumlah 13 orang yang terdiri dari Kepengurusan PKK. Berdasarkan hasil observasi, tim panitia pelaksana program bantuan sembako kelurahan purwoyoso, bertanggung jawab kepada Lurah Purwoyoso, yang mana dalam hal ini segala perizinan atau informasi mengenai laporan-laporan atau administrasi terutama dari sisi anggaran, disampaikan kepada kepala kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, kepala kelurahan hadir dalam memberi sambutan kepada penerima, dan tim panitia lainnya memberi bantuan sembako tersebut kepada penerima. Hubungan kerjasama tim panitia pelaksana program dapat dikatakan berjalan dengan baik karena masing-masing dalam jabtannya melakukan tugas dan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, Tim Penggerak PKK dibantu oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dalam hal ini BKM membantu dalam penyeleksian data dan perekapan data penerima, sedangkan LPMK turut membantu saat pendistribusian.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Penulis telah memaparkan dan menganalisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasar pada hal tersebut, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi program bantuan sembako di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang, sejauh ini mulai dari 2019-2021 masih berjalan dengan baik. Meskipun sempat kurang mendapatkan dukungan dari beberapa masyarakat, tetapi dengan good governance salah satunya yaitu transparan (dalam hal ini transparan baik itu mengenai informasi maupun laporan dalam keuangannya) yang diterapkan oleh Lurah Purwoyoso, akhirnya sebagian besar masyarakat di kelurahan purwoyoso beserta pihak yang bekerjasama dengan kelurahan purwoyoso turut mendukung program ini karena dirasa program ini sangat bermanfaat untuk membantu sebagian masyarakat kelurahan purwoyoso yang kurang mampu terutama janda lansia. Analisa peneliti dalam pendistribusian sembako dalam program ini adalah, warga yang mendapatkan beberapa terdiri dari rekomendasi salah satu pengurus.

Melalui wawancara kepada beberapa tim penggerak PKK Kelurahan Purwoyoso, yang menjadi masukan dalam berjalannya program kegiatan bantuan sembako ini adalah belum terdokumentasikan dengan baik untuk berapa paket sembako yang terbagikan. Karena menurut data yang didapat, pembagian dan pembelanjaan untuk sembako pada laporan keuangan jimpitan, hanya terjadi pada bulan bulan tertentu sedangkan pada laporan keuangan, pemasukan jimpitan ada pada setiap bulannya, untuk itu bisa dijadikan masukan agar dana jimpitan yang terkumpul dalam program bantuan sembako setiap bulannya lebih dimanfaatkan untuk pembelanjaan sembako dan kegiatan sosial lainnya yang ada pada Kelurahan Purwoyoso dan terdokumentasikan dengan baik melalui laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Lurah Purwoyoso selaku penggerak program ini, melakukan kerjasama dengan CSR-CSR yang ingin mendukung berhasilnya program kegiatan pembagian sembako yang ada di kelurahan purwoyoso, sehingga bisa menambah kuota jumlah penerima sembakonya, akan tetapi CSR maupun donatur lainnya tersebut yaitu bersifat tidak tetap. Untuk itu, tim penggerak PKK sebagai panita program ini mengemasnya dengan cara membagikan sembako dengan jumlah yang lebih banyak saat moment-moment tertentu seperti lebaran atau hari - hari besar lainnya.

Kedua, Dilihat dari faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi implemmentasi program ini dapat berjalan yaitu mulai dari sisi komunikasi, program ini dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi yang baik diantara pihak kelurahan (antar sesama tim panitia berupa persiapan yang harus disiapkan dan menghadapi persoalan atau permasalahan bersama dan pengambilan keputusan bersama) maupun dengan masyarakat (berupa informasi yang harus diinformasikan). Kerjasama yang terbentuk dalam berlangsungnya implementasi dapat dikatakan berhasil sebagian besar karena pengaruh dari komunikasi. Setelah komunikasi, faktor kedua program ini dapat berjalan yaitu karena sumber daya yang mendukung, seperti sarana tempat yang mendukung, kalau pembagian secara rutin di kantor sekretariat BKM, jika pembagian sembako saat ada moment atau hari besar, di balai kelurahan. Untuk sumber daya anggaran juga cukup berpengaruh dalam implementasi program ini, yaitu donatur tetap (warga), dan donatur tidak tetap (CSR dan perseorangan).

Faktor yang selanjutnya berpengaruh dalam implementasi program ini yaitu dari struktur birokrasinya, terbentuknya struktur kepengurusan membuat program sosial ini bisa berjalan dengan terorganisir, sudah ada tugas dan fungsinya masing-masing, faktor selanjutnya yaitu dapat dilihat dari disposisi atau sikap, sikap yang dimaksud disini adalah sikap perilaku, perilaku yang saling mendukung dan juga demokratis serta transparan sehingga implementasi program ini dapat tetap berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, M. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Agustino, L. (2008). *Dasar dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmad Rafi, D. K. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Fungsi Badan Permusyawaratan di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, VI.
- Aneta, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Auldrin M. Ponto, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan. *Jurnal Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*, III, 39.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Dantes, P. D. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Dony Holidin, D. H. (2016). *Reformasi Birokrasi dalam Transisi*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Dr. Wahidmurni, M. (2017, Juli). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.
- Farikhin. (2020, Maret 9). *kknngalihan2020.ivet.ac.id*. Retrieved Juli 25, 2020, from Profil Kelurahan Purwoyoso: <http://kknngalihan2020.ivet.ac.id/berita-profil--kelurahan-purwoyoso.html>
- Fatkul Khoiriyah, L. O. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, XV.

- Hardi, R. (2011). Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Politik di Kota Pare Pare. *Jurnal Hasil Penelitian, I*.
- Huberland, M. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Imtihan, W. F. (2017). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Hasil Penelitian, XI*.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi, XIV*.
- Maryuni, S. (2017). Efektivitas Implementasi Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak. *Jurnal Hasil Penelitian, XII*.
- Mustafa, D. (2018). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mustafa, D. D. (2018). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.
- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M. (2015). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Reknani, D. (2015). Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. *Hasil Penelitian*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tangkilisan, D. H. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Warsito, H. T. (2016). Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bebas Teknologi Informasi di Kelurahan Kebaron Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 4*.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Jurnal Hasil Penelitian, 9*.

## LAMPIRAN

### Transkrip Hasil Wawancara Penelitian

**(transkrip ini hanya berisi draft pertanyaan dan narasumber, untuk jawabannya sudah ada dalam pembahasan)**

- Draft pertanyaan wawancara “Program Inovasi Kegiatan Bantuan Sembako di Kelurahan Purwoyoso kecamatan Ngaliyan kota Semarang”  
Tanggal : 10 Juni 2021  
Pewawancara : Rizka Ainun Izza  
Narasumber : Lurah Purwoyoso, Patrick Bagus Yudhistira

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi Lurah di Kelurahan Purwoyoso?
  2. Bagaimana sejarahnya adanya program ini?
  3. Bagaimana untuk peraturan tertulisnya dari program ini?
  4. Siapakah sasaran dalam program ini?
  5. Apa tujuan dari program ini?
  6. Siapa saja yang mengelola?
  7. Mengapa dibentuk program ini?
  8. Sejauh ini, apakah program dapat berjalan efektif atau tidak?
- Draft pertanyaan wawancara “Analisis pengelolaan program inovasi kelurahan kegiatan bantuan sembako di kelurahan purwoyoso kecamatan ngaliyan kota Semarang”  
Tanggal : 11 Juni 2021  
Pewawancara : Rizka Ainun Izza  
Narasumber : Yathy Noorhayati, pengurus inti bendahara program

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Bagaimana komunikasi antara Lurah dengan bendahara terkait pelaksanaan program bantuan sembako ini?
2. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya?
3. Bagaimana terkait laporan keuangannya?
4. Bagaimana sistem pembelanjaan untuk program bantuan sembako ini?
5. Apa saja isi dari sembako tersebut?
6. Berasal darimana saja untuk dananya?

- Draft pertanyaan wawancara “Analisis data penerima bantuan sembako kelurahan purwoyoso”

Tanggal : 15 Juni 2021

Pewawancara : Rizka Ainun Izza

Narasumber : Koordinator BKM kelurahan purwoyoso , Supardi

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Bagaimana data sistem penerimanya ?
2. Bekerjasama dengan pihak mana sajakah program ini?
3. Bagaimana dukungan lurah dalam pelaksanaan program ini?
4. Bagaimana untuk sistem pengkolektifan dananya?

- Draft pertanyaan wawancara “Analisis Penerimaan Program Bantuan Sembako di kelurahan Purwoyoso”

Tanggal : 10 Desember 2021

Pewawancara : Rizka Ainun Izza

Narasumber : Ketua RW, XI Ratno

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Sebelumnya, berasal dari mana bapak mengetahui program jimpitan sembako di kelurahan purwoyoso ini?

2. Bagaimana akhirnya bapak mendukung akan adanya kegiatan ini?
  3. Biasanya ada berapa banyak warga yang menerima, apakah tetap atau berubah?
- Draft pertanyaan wawancara “analisis respon masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bantuan sembako di kelurahan purwoyoso”

Tanggal : 12 Oktober 2021

Pewawancara : Rizka Ainun Izza

Narasumber : warga RT 02 RW X1, Nur Hidayah

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apakah ibu sebagai warga RT mengetahui tentang adanya program tersebut?
2. Apakah setuju dengan adanya program tersebut?
3. Bagaimana sistem kolektif untuk dana jimpitann tersebut?

DRAF WAWANCARA KEPADA WARGA PENERIMA BANTUAN SEMBAKO KELURAHAN PURWOYOSO  
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Nama / Jenis Kelamin :

RT / RW / USIA :

1. Apakah dari awal adanya bantuan sembako ini, sudah menjadi penerima sampai sekarang (penerima tetap) ?
2. Setiap berapa bulan sekali penerima menerima bantuan sembako dari kelurahan?
3. Apakah penerima mengetahui bahwa dana dari sembako ini sebagian besar berasal dari jimpitan para warga?
4. Apakah penerima masih tinggal bersama keluarga atau sudah tinggal seorang diri ?
5. Apakah penerima masih dalam kondisi yang sehat ? (tidak ada penyakit khusus dan lain sebagainya)
6. Apakah penerima juga sedang menerima bantuan lain ?
7. Apakah penerima masih bekerja atau tidak?  
\*kalau bekerja, berapa penghasilan yang diterima perbulan?
8. Biasanya bisa bertahan sampai berapa bulan untuk bantuan sembako yang diberikan?
9. Apakah penerima setuju bahwa program ini adalah program yang berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk penerima ?
10. Apakah penerima setuju bahwa program ini bermanfaat untuk membantu meringankan kebutuhan pangan penerima ?



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN NGALIYAN**  
**KELURAHAN PURWOYOSO**  
Jl. Sriwidodo Utara No. 104 Telp. (024) 7602275 Semarang

**KEPUTUSAN LURAH PURWOYOSO**  
**KECAMATAN NGALIYAN**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 465.1 / 163 / XII / 2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGURUS PROGRAM BANTUAN SEMBAKO LANSIA KURANG MAMPU**  
**KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN**  
**MASA BHAKTI 2020-2022**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Purwoyoso dipandang perlu ikut serta meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Untuk itu dipandang perlu membentuk Pengurus Program Bantuan Sembako Janda Lansia Kelurahan Purwoyoso.
- Mengingat** : 1. Undang -undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; ✓
4. Permendagri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK;
- 5) Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2020 tentang Bansos bagi warga terdampak Covid - 19.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Membentuk Pengurus Program Bantuan Sembako Lansia Kurang Mampu Kelurahan Purwoyoso dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Pengurus Program Bantuan Sembako dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugas operasional dibawah pimpinan Lurah Purwoyoso;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pengurus Program Bantuan Sembako Lansia Kurang Mampu bertanggung jawab kepada Lurah Purwoyoso.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 29 Desember 2020



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Camat Ngaliyan;
  2. Ketua RW se - Kelurahan Purwoyoso;

Lampiran Keputusan Lurah Purwoyoso  
Nomor : 465.1 / 163 / XII / 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM BANTUAN SEMBAKO LANSIA KURANG MAMPU  
KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2020-2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Ny. Himmatul Aliyah Yudhistira	Ketua
2.	Sri Utami	Sekretaris
3.	Yathy Noorhayati	Bendahara
4.	Sugiharti	Anggota
5.	Tri Wulandari	Anggota
6.	Dian Sani Susilawati	Anggota
7.	Mahmudah	Anggota
8.	Nunung Tri Sasanti	Anggota
9.	Ikha Sub Handayani	Anggota
10.	Eko Wahyuni	Anggota
11.	Risnawati	Anggota
12.	Tiena Maryuni	Anggota
13.	Erna Hermiyati	Anggota



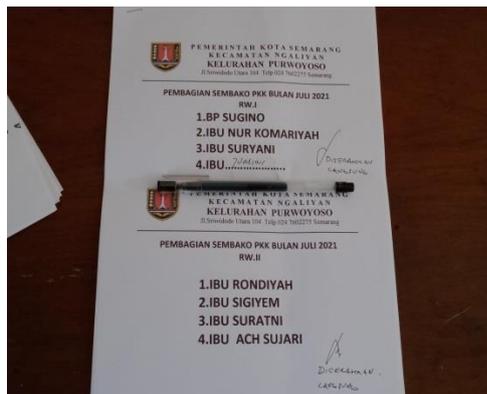
**LAMPIRAN FOTO PROSES WAWANCARA SECARA LANGSUNG KEPADA NARASUMBER**



## LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PROGRAM PEMBAGIAN SEMBAKO DENGAN RELAWAN DAN TIM PANITIA



## LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PROGRAM PEMBAGIAN SEMBAKO BULAN (TANDA SERAH TERIMA DAN ISI SEMBAKO)



**LAMPIRAN DOKUMENTASI DARI SOSIAL MEDIA AKUN INSTAGRAM  
KELURAHAN PURWOYOSO**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri :

- 1) Nama : Rizka Ainun Izza
- 2) Tempat / Tgl Lahir : Semarang, 13 Maret 1999
- 3) Jenis Kelamin : Perempuan
- 4) Agama : Islam
- 5) NIM : 1706016069
- 6) Alamat : Jalan Bukit Barisan DV/ 01 Bringin, Ngaliyan Semarang
- 7) No. Telp/ Hp : 089508850288
- 8) Email : rizkainunizza@gmail.com
- 9) Nama ayah : Jantho PS
- 10) Nama Ibu : Fitri Rachmani

### B. Riwayat Pendidikan :

- 1) TK PGRI IV Ngaliyan : 2005 (Lulus)
- 2) SD Negeri Ngaliyan 01 : 2011 (Lulus)
- 3) SMP Kesatrian 02 Semarang : 2014 (Lulus)
- 4) SMA Negeri 13 Semarang : 2017 (Lulus)